



LAPORAN KINERJA

DITJEN PT

2020

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renja tahun 2020, Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi DJPT kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2021.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja DJPT 2020 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 8 Februari 2021

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Muhammad Zaini

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renja tahun 2020, Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi DJPT kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2021.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja DJPT 2020 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 7 Februari 2021

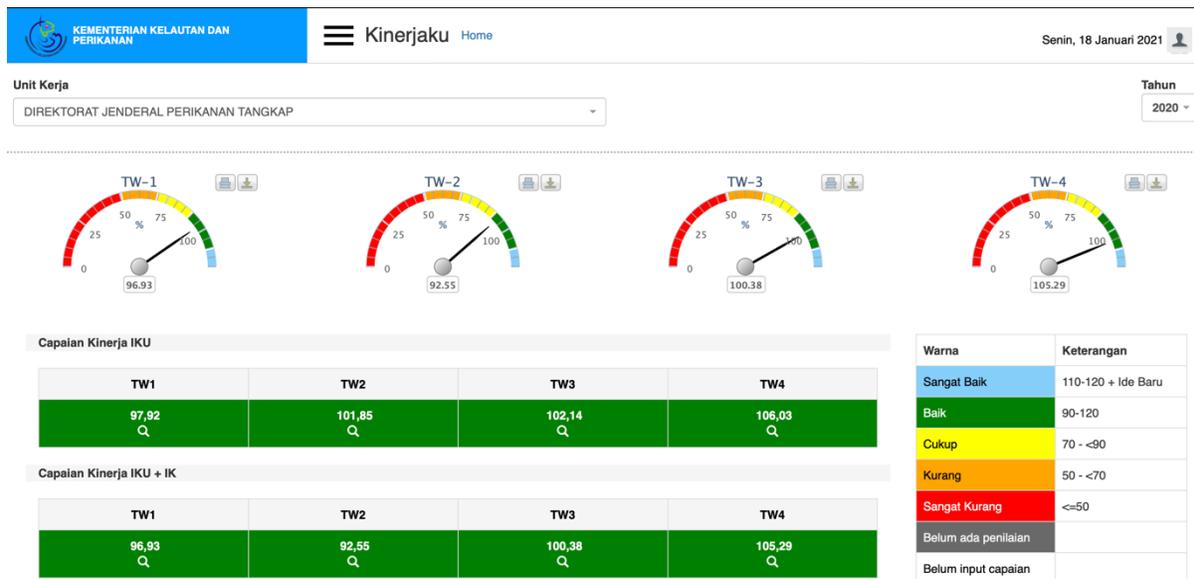
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Muhammad Zaini

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.685.697.000,-, dalam perjalanannya pagu Ditjen Perikanan Tangkap terjadi perubahan sepanjang tahun 2020 yang merupakan revisi pemotongan ke DJPB, pemotongan penanganan COVID-19 dan penambahan anggaran stimulus COVID-19. Sehingga pagu akhir Ditjen Perikanan Tangkap TA 2020 sebesar Rp. 575.400.303.000,- Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 ini terealisasi sebesar Rp. 492,002,352,908,- atau mencapai 85,51%. Secara kinerja Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 105,29% sebagaimana dashboard dibawah ini :



Hal ini didukung oleh pencapaian 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dimana terdapat 15 (lima belas) IKU yang mencapai target 100 persen yakni sebagai berikut :

1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)
2. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)
3. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)
4. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (skala kemandirian)
5. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
6. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)
7. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)

8. Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
9. Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)
10. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)
11. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
13. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
14. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
15. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Namun demikian, terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target antara lain :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)
2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2020. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan dapat mendukung kinerja Ditjen Perikanan Tangkap yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	7
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
<i>Sasaran Strategis (SS-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkat</i>	17
<i>Sasaran Strategis (SS-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>	19
<i>Sasaran Strategis (SS-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab</i>	24
<i>Sasaran Strategis (SS-4): Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat</i>	26
<i>Sasaran Strategis (SS-5): Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri</i>	34
<i>Sasaran Strategis (SS-6): Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik</i>	45
3.3 KINERJA ANGGARAN	63
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	64

BAB IV PENUTUP

65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	11
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020	16
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2020	18
4	Capaian IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman” Tahun 2020	20
5	Capaian IKU “WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola” Tahun 2020	24
6	Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2020	26
7	Perbandingan target tahun 2020 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya	27
8	Lokasi kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	28
9	Capaian IKU “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	34
10	Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab DJPT Tahun 2020	35
11	Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	46
12	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020	47
13	Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	48
14	Capaian Komponen Pembentuk Indeks Profesionalitas per Unit Kerja di DJPT Tahun 2020	49
15	Capaian IKU “Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)” Tahun 2020	51
16	Capaian IKU “Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019” Tahun 2020	52
17	Capaian IKU “Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	53
18	Komponen PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020	53
19	Capaian IKU “Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	55
20	Hasil Pencapaian Nilai Evaluasi Level Maturitas SPIP DJPT Per Aspek Komponen Tahun 2018-2020	55

21	Capaian IKU “Unit Kerja DJPT Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” Tahun 2020	56
22	Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar” Tahun 2020	57
23	Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	59
24	Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	60
25	Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	61
26	Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020	62
27	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kegiatan	63
28	Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja	63
29	Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan	63
30	Efisiensi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Strategis	64

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020	3
2	Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Tahun 2020	16
3	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2020	18
4	Grafik perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan, Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2020	19
5	Grafik Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2019-2020 terhadap potensi dan JTB	21
6	Grafik Perkembangan Kegiatan Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2016-2020	22
7	Grafik Perkembangan Kegiatan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2016-2020	22
8	Struktur Organisasi LPP di WPPNRI	25
9	Grafik Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2020 per triwulan	27
10	Grafik Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, Produk Olahan dan Garam pada Tahun 2020	27
11	Grafik perkembangan Buku Kapal Perikanan	30
12	Grafik perkembangan capaian rekomendasi PPKP	31
13	Sebaran Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020	32
14	Capaian kegiatan sertifikasi awak kapal perikanan tahun 2019 dan per Triwulan tahun 2020	33
15	Grafik radar rata-rata penilaian SKPT tanggung jawab DJPT tahun 2020	35
16	Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Natuna tahun 2017-2020	36
17	Grafik kunjungan kapal di SKPT Natuna tahun 2017-2020	37
18	Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Natuna Tahun 2020	38
19	Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Sebatik tahun 2018-2020	39
20	Grafik kunjungan kapal di SKPT Sebatik tahun 2018-2020	39
21	Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Sebatik Tahun 2020	40
22	Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Saumlaki tahun 2018-2020	41
23	Grafik Kunjungan kapal di SKPT Saumlaki tahun 2018-2020	41
24	Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki Tahun 2020	42
25	Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Merauke tahun 2018-2020	43

26	Grafik kunjungan kapal di SKPT Merauke tahun 2018-2020	44
27	Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Merauke	45
28	Hasil Pengukuran IP ASN per Komponen Tahun 2020	48
29	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2020	50
30	Perkembangan Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2015-2020	51
31	Capaian Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup DJPT es II per komponen Tahun 2020	58

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya

pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2020 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2020. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2019 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam hal ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi yakni:

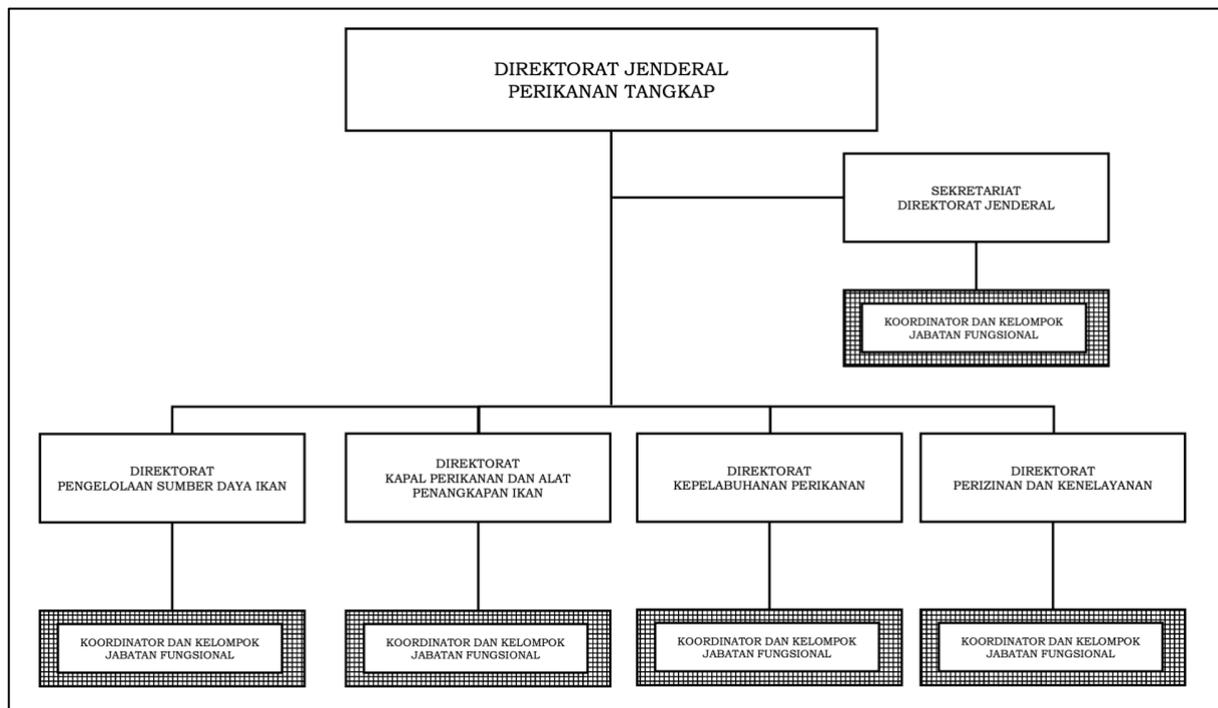
1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

II. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

III. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

IV. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

V. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

VI. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal dengan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif;

- c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "**Kesejahteraan nelayan meningkat**", dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan.
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "**Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan**", dengan indikator kinerja: Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "**Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab**", dengan indikator kinerja: WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "**Produktivitas perikanan tangkap meningkat**", dengan indikator kinerja: Jumlah produksi perikanan tangkap.
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "**Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri**", dengan indikator kinerja: Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap.
6. Sasaran strategis ketujuh (SS-6) yang akan dicapai adalah "**Tata kelola pemerintahan yang baik pada Ditjen Perikanan Tangkap**", dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap;
 - c. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - d. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019;
 - e. Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap;
 - f. Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap;
 - g. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik;

- h. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
- i. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- j. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap;
- k. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap;
- l. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap;

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020, secara rinci sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : **Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edhy Prabowo**

Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Agustus 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	101
2.	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤64
3.	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (kumulatif) (WPP)	3
4.	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	7,07
5.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (tingkat kemandirian)	4
6.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di li	6	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30
		7	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72
		8	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		9	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)	≤ 1
		10	Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85
		11	Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3
		12	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		13	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	82
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60

		15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	70
		16	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88
		17	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85

Program : **Pengelolaan Perikanan Tangkap**
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 565.685.697.000,-**

Rp000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12.612.480,-
2.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	67.855.452,-
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	72.102.811,-
4.	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	46.435.300,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	366.565.985,-
Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020		565.685.697,-

Jakarta, 9 Agustus 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

09

Muhammad Zaini

2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)
		2	Identifikasi dan Penetapan Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan
		3	Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan
		4	Penyusunan/penyempurnaan pedoman pendanaan usaha nelayan
		5	Rapat Koordinasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan
		6	Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Expo dan Gerai
		7	Temu Koordinasi dalam rangka Evaluasi Akses Pendanaan Usaha Nelayan
		8	Penyusunan Juknis Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) Nelayan
		9	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi SeHAT Nelayan
		10	Supervisi dan Evaluasi Fasilitasi SeHAT Nelayan
		11	Penyusunan Pedoman Perlindungan Nelayan dan Fasilitasi Asuransi Nelayan Mandiri
		12	Gerai Fasilitasi Perlindungan Nelayan dan Asuransi Nelayan Mandiri
		13	Penyusunan pedoman diversifikasi usaha nelayan
		14	Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya
		15	Temu Teknis Diversifikasi Usaha Nelayan
		16	Penyusunan/penyempurnaan Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan
		17	Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi Nelayan)
		18	Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)
		19	Penyusunan Pedoman Fasilitasi Penataan Sentra/Kampung Nelayan
		20	Sosialisasi, Identifikasi dan Sinergi Fasilitasi Penataan Sentra/Kampung Nelayan
		21	Pelaksanaan Penataan sentra/kampung nelayan melalui program CSR/PKBL
2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	1	Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		2	Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan Pusat-Daerah
		3	Pelaksanaan alokasi sumber daya ikan pusat-daerah serta pemantauannya
		4	Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi data logbook penangkapan ikan
		5	Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan

No	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	
		6	Pengolahan dan analisis data logbook penangkapan ikan
		7	Rapat teknis logbook penangkapan ikan
		8	Penyajian Data Logbook Penangkapan Ikan
		9	Upgrading, briefing dan debriefing observer di atas kapal perikanan
		10	Penempatan observer di atas kapal perikanan
		11	Pengolahan dan analisis data observer di atas kapal perikanan
		12	Penyajian Data Observer diatas Kapal Perikanan
3	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	1	Penyusunan Laporan Tahunan IOTC dalam rangka Kerjasama pengelolaan perikanan ZEEI dan laut lepas
		2	Kerjasama dan partisipasi Indonesia pada forum Internasional dalam rangka Pengelolaan Perikanan Tuna dan Spesies Tuna
		3	Bali Tuna Conference dan International Coastal Tuna Bussiness Forum
		4	Pertemuan Tahunan IOTC
		5	Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tuna, Cakalang Tongkol / Fisheries Improvement Program (FIP)
		6	Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perikanan Tuna
		7	Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO
		8	Pemanfaatan Kuota Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Catch Documentation Scheme
		9	Implementasi Harvest Strategy Pemanfaatan Tuna di WPP 713, 714 dan 715
		10	Penyusunan Kriteria Alokasi Kuota
		11	Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu di WPNRI
		12	Penyusunan Harvest Strategy Perikanan Prioritas di WPPNRI
		13	Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718
		14	Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI
		15	Implementasi EAFM di WPPNRI
		16	Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat
		17	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat Berbasis Ekosistem
		18	Koordinasi Implementasi Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (P3D)
		19	Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem
		20	Updating Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI
		21	Penyusunan Arah Tindakan Pengelolaan Perikanan Melalui Komisi LPP WPPNRI
		22	Penyusunan Arah Tindakan Pengelolaan Perikanan Melalui Panel LPP WPPNRI
		23	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 711, 712 dan 713 sebagai Model Percontohan
		24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasionalisasi LPP WPPNRI
		25	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 713
		26	Pengelolaan Sumber Daya Ikan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan, ZEEI dan perairan darat
		27	Perairan yang dipantau dianalisis pengelolaan Sumber Daya Ikannya

No	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	
4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	1	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya
		2	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya
		3	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya
		4	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya
		5	Pembinaan Pelaksanaan Kesyahbandaran
		6	Pembinaan Pelaksanaan SHTI
		7	Pembinaan Pelaksanaan CPIB
		8	Pembinaan Pelaksanaan WKOPP
		9	Pembinaan Pelaksanaan PIPP
		10	Persentase Pembinaan Pelaksanaan Operasional Lainnya
		11	Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)
		12	Penyusunan/reviu pedoman rancang bangun, standarisasi, dan pemeriksaan fisik kapal perikanan
		13	Pelaksanaan rancang bangun, standarisasi dan pemeriksaan fisik kapal perikanan
		14	Penyusunan/reviu pedoman pendaftaran dan penandaan kapal perikanan
		15	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat
		16	Penyusunan/reviu juknis bantuan kapal perikanan
		17	Pelaksanaan bantuan kapal perikanan
		18	Penyusunan/reviu pedoman persetujuan pengadaan kapal perikanan
		19	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan
		20	Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan, dan rancangan standar alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		21	Penyusunan/reviu juknis stimulus bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		22	Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan
		23	Penyusunan/Reviu pedoman penerapan Perjanjian Kerja Laut
		24	Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan
		25	Pengumpulan dan analisis data produktivitas kapal perikanan
		26	Pengumpulan dan analisis data serta evaluasi operasional kapal perikanan
		27	Review Usaha Perikanan Tangkap
		28	Dukungan Peningkatan Operasional Perizinan dan Kenelayanan
		29	Verifikasi Faktual Izin Usaha Perikanan
		30	Sosialisasi Perizinan Usaha Perikanan
		31	Due Diligence Izin Penangkapan Ikan
		32	Review Perizinan Kapal Perikanan
		33	Verifikasi Faktual Kapal Perikanan
		34	Sosialisasi Tatacara, Persyaratan dan Prosedur Perizinan Kapal Perikanan
		35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencetakan Izin Kapal Perikanan

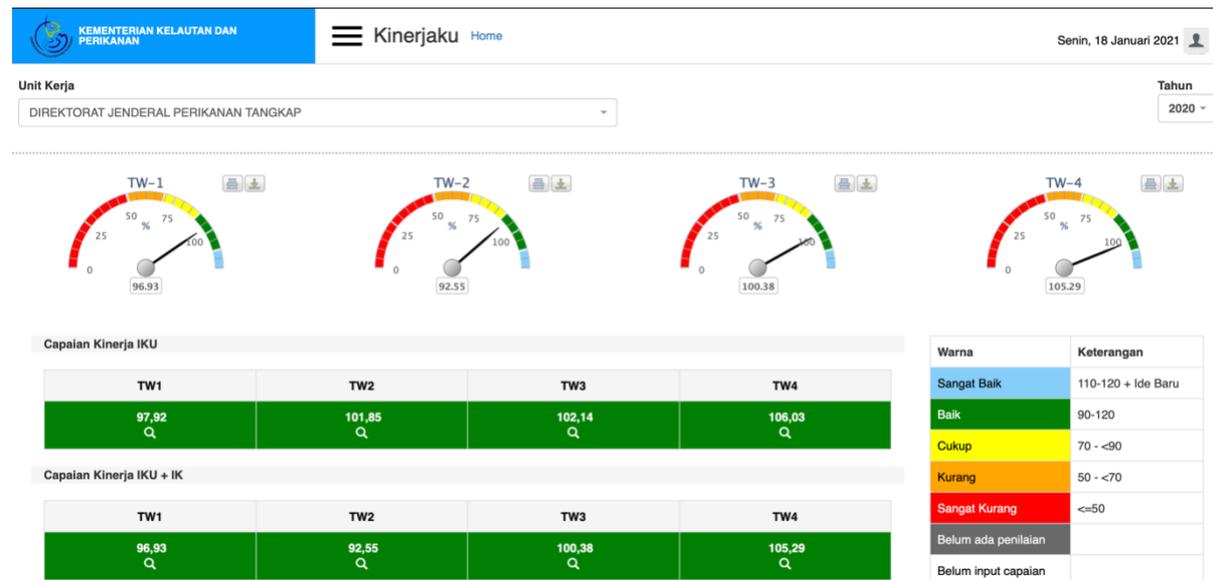
No	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	
		36	Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah
		37	Koordinasi dalam rangka Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah
		38	Bimbingan Teknis SIMKADA Petugas PTSP & DKP Provinsi Wilayah Barat
		39	Bimbingan Teknis SIMKADA Petugas PTSP & DKP Provinsi Wilayah Timur
		40	Pendampingan dan Sosialisasi Implementasi LKU/LKP
		41	Evaluasi Sanksi Administratif Perizinan Pusat dan Daerah
		42	Updating Sistem Perizinan SIPEPI, SIMKADA & LKU/LKP
5	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (skala kemandirian 1-5)	1	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna
		2	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Merauke
		3	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik
		4	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep Tanimbar (saumlaki)
6	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	1	Nilai PMPRB bidang Manajemen Perubahan (SDMA)
		2	Nilai PMPRB bidang Deregulasi Kebijakan (HOK)
		3	Nilai PMPRB bidang Penataan dan Penguatan Organisasi (HOK)
		4	Nilai PMPRB bidang Penataan Tatalaksana (HOK)
		5	Nilai PMPRB bidang Sistem Manajemen SDM (SDMA)
		6	Nilai PMPRB bidang Penguatan Akuntabilitas (Program)
		7	Nilai PMPRB bidang Pengawasan (Kuangan)
		8	Nilai PMPRB Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (HOK)
		9	Penyusunan dokumen RB dan Evaluasi SOP di lingkup Dit. Pelabuhan Perikanan
7	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	1	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Dit. PSDI
		2	Pengelolaan Kepegawaian
		3	Penyelenggaraan SDM Aparatur Direktorat Pelabuhan Perikanan
		4	IP ASN Direktorat Pengelolaan SDI
		5	IP ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan
		6	IP ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
		7	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
		8	IP ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
8	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	1	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen Perikanan Tangkap
9	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)	1	pelaksanaan perencanaan, program kegiatan dan anggaran satker Direktorat KAPI
		2	Pendampingan Pemeriksaan dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHA/LHP dan instansi terkait-DIT. KAPI
		3	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Ditjen Perikanan Tangkap
10	Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	1	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
		2	Persentase pemenuhan dokumen PM SAKIP DJPT
		3	Persentase pemenuhan dokumen rekonsiliasi kinerja satker

No	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	
11	Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	1	Implementasi dan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Di Direktorat Pelabuhan Perikanan
12	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	Inovasi pelayanan publik pelayanan Perizinan perikanan tangkap melalui SILAT
13	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	1	Penunjang Operasional Kantor Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		2	Penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Dit. Pelabuhan Perikanan
		3	Operasional Kantor Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
		4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		5	Persuratan dan Kearsipan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
		6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	1	Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (%)	1	Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (%)
16	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	1	Realisasi capaian IKPA Ditjen Perikanan Tangkap
17	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	1	Realisasi capaian kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2020 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Tahun 2020

Capaian kinerja DJPT pada akhir tahun 2020 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 105,03% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 105,29%. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	101	100,22	99,23
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<64	61,43	104,02
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	3	3	100,00
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	7,70	7,70	100,00
5	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (skala kemandirian)	4	4	100,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	6	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	32,32	107,73
		7	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72	68,25	94,79
		8	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	8	10	125,00
		9	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)	1	0,13	187,00
		10	Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	85,21	100,25
		11	Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3	4	133,33
		12	Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	100,00
		13	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	82	96,19	117,30
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60	79,06	131,77
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	70	92,55	132,21
		16	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	93,16	105,86
		17	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	92,02	108,26

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Strategis-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam kaitan ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh DJPT.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan sejahtera. Selama tahun 2020, realisasi NTN nasional rata-rata di atas 100.

Realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 106,14, tahun 2016 sebesar 108,24, tahun 2017 sebesar 111,02 tahun 2018 sebesar 113,28 dan tahun 2019 sebesar 113,74 atau mencapai 100,65% dari target sebesar 113.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2020

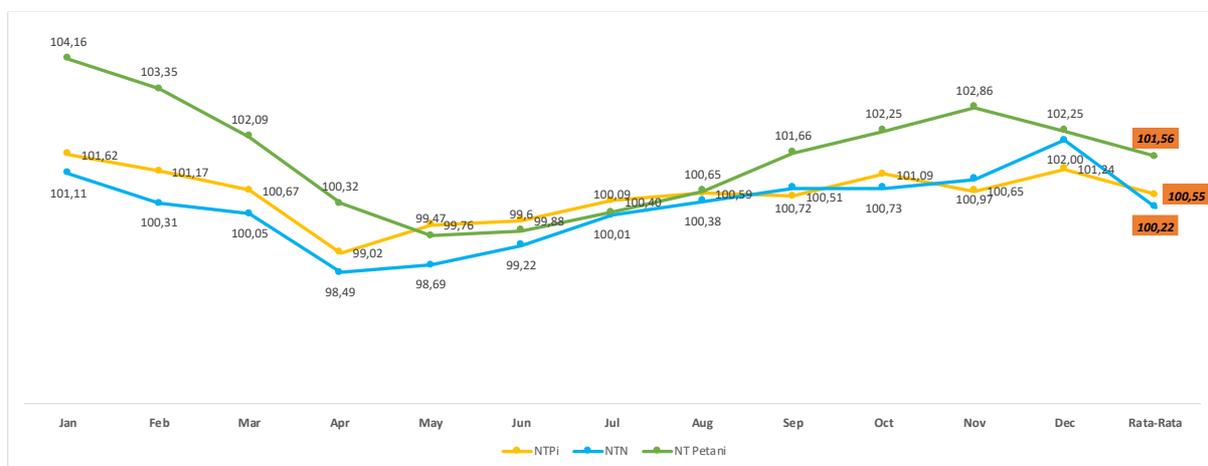
Sasaran Strategis-1				Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan					
IKU-1				Nilai Tukar Nelayan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
108,24	109,86	113,28	113,74	101	100,22	99,23	-	101	99,23

Berdasarkan hasil pemantauan harga di 34 provinsi di Indonesia oleh BPS, rata-rata NTN dari bulan Januari - Desember 2020 sebesar 100,22 atau telah tercapai 99,23% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa indeks yang diterima oleh nelayan (IT) dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan (IB) berada tidak jauh dari titik impas yaitu 100. Namun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa nelayan berada di titik dimana kesejahteraan nelayan masih lebih baik karena indeks yang diterima masih lebih besar dibanding yang dikeluarkan. Setiap ada Survey Biaya Hidup itu bisa menjadi momen untuk merubah tahun dasar IHK (Indeks Harga Konsumen) Sebelumnya, perhitungan BPS menggunakan acuan Tahun Dasar 2012. Setelah lima tahun, harus diperbaharui. Metodologi penghitungan IHK 2020 ini akan mengacu pada *classification of individual consumption according to purpose (COICOP)* tahun dasar 2018 dalam perhitungan NTN, ada dinamika baru yang harus diakomodasikan, ada pula yang harus dihilangkan. Sehingga capaian pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian NTN tahun 2019 karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012 sedangkan saat sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2018.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan signifikan antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020, hal ini dikarenakan karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Tahun 2019 rata-rata NTN mencapai 113,74. Sampai dengan akhir tahun 2019, NTN mengalami tren peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh naiknya indeks pendapatan nelayan karena mulai terjadinya musim ikan, semakin baiknya kualitas hasil tangkapan, serta fluktuasi biaya operasional. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sejak Januari sampai dengan Mei yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pemasaran ikan terbatas dan harga ikan menurun yang disebabkan sebagian wilayah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta adanya hambatan terkait dengan ekspor. Namun untuk biaya operasional melaut tidak terjadi penurunan. Untuk mendorong peningkatan NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan berbagai upaya dan stimulus yang dilakukan dalam menanggulangi dampak ekonomi Covid-19 pada sub sektor perikanan tangkap. Sehingga sejak bulan Mei mulai naik kembali dan pada bulan Juli, NTN telah mencapai di atas 100 maka nelayan sejahtera.



Gambar 4. Grafik perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan, Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2020

Gambar diatas memperlihatkan capaian perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan, Nilai Tukar Petani (NT Petani) selama Tahun 2020, yakni terlihat bahwa capaian NTN paling rendah dibandingkan dengan NTPi dan Petani yakni sebesar 0,33 persen terhadap NTPi dan 1,34 persen terhadap NT Petani. Hal ini disebabkan oleh harga yang diterima nelayan lebih rendah daripada harga yang diterima oleh pembudidaya ikan dan petani sedangkan harga yang dibayarkan baik oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petani relatif sama besar. Tingginya indeks harga yang diterima oleh nelayan dikarenakan terjadinya penurunan permintaan akan ikan konsumsi dari laut dibandingkan ikan yang hasil budidaya yang juga didominasi oleh ikan air tawar khususnya untuk komoditas ikan ekonomi tinggi seperti Tuna, Kakap, Cumi – cumi dan lain sebagainya serta nelayan tidak dapat melaut dikarenakan pandemi COVID-19 yang menerapkan protokol PSBB.

Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Strategis-2 “Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang dilakukan dengan memperhatikan

memastikan bahwa laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai MSY di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan dan tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

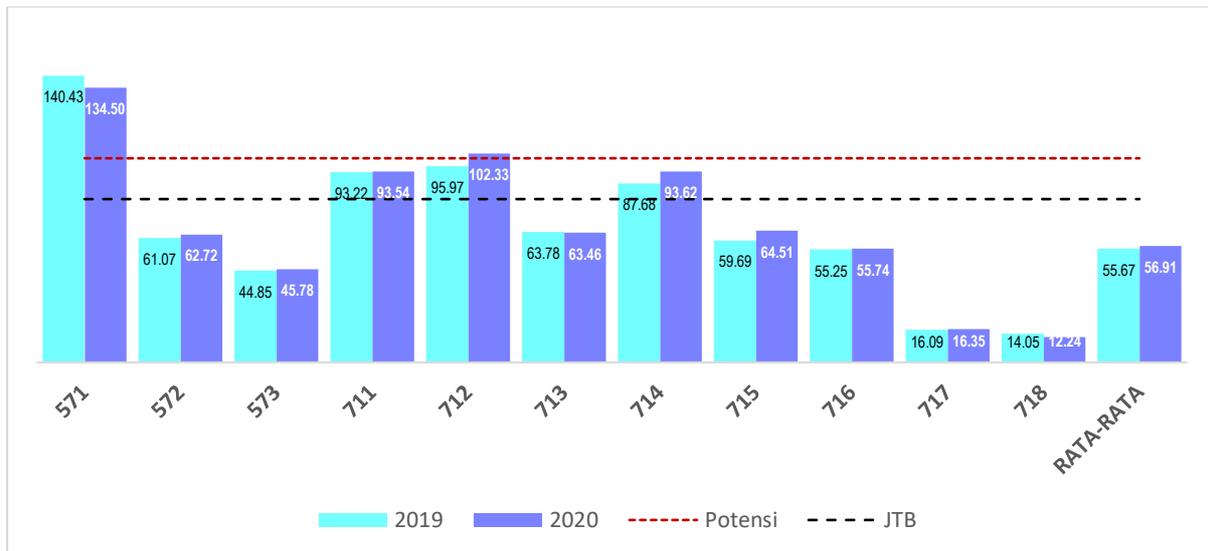
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu. Adapun perhitungan IKU ini adalah dari jumlah volume produksi pada saat tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017). Sebagai data pembanding, perhitungan indikator Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman didukung oleh 2 kegiatan yaitu, logbook penangkapan ikan (LBPI) dan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer).

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Tabel 4. Capaian IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman” Tahun 2020

Sasaran Strategis-2				Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan					
IKU-2				Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	-	<64	56,91	111,08	-	<64	111,08

Capaian indikator ini telah mencapai 111,08% atau telah diatas target <64%. Capaian ini masih berada dalam batas biologis yang aman, namun tidak menurunkan kondisi ekonomi pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Hal ini menyatakan bahwa potensi sumber daya ikan belum dioptimalkan karena penangkapan ikan sebagian besar dilakukan oleh nelayan tradisional masih di sekitar teluk dan pantai dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih dibawah nilai MSY, tingkat pemanfaatan masih dalam status lestari sehingga perlu diupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.



Gambar 5. Grafik Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2019-2020 terhadap potensi dan JTB

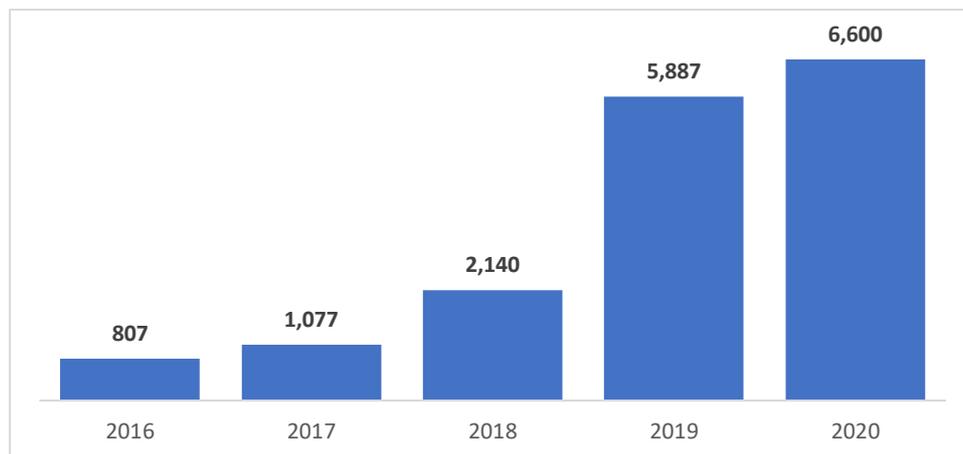
Pada gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah melampaui potensi yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data potensi yang diterbitkan hanya menggunakan 9 (sembilan) kelompok jenis ikan, yaitu Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan dan Cumi-cumi. Sedangkan data volume produksi yang digunakan adalah total jenis ikan termasuk spesies Tuna, Cakalang, Ubur-ubur, Penyu, Binatang berkulit keras, Kekeurangan, Sotong, Gurita, Teripang dan Rumpun Laut. Namun, secara keseluruhan tingkat pemanfaatan perikanan laut di Indonesia masih dibawah jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) atau masih dikatakan belum optimum. Penyebabnya adalah distribusi nelayan dan kapal ikan yang tidak merata. Lebih dari 90 persen armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi. Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap. Jika laju penangkapan ikan seperti sekarang berlanjut, tangkapan per kapal akan menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan pun punah seperti ikan terubuk di Selat Malaka dan ikan terbang di pesisir selatan Sulawesi. Sebaliknya, jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia hanya terbatas. Oleh karenanya laju penangkapan ikan di perairan yang telah kelebihan tangkap harus dikurangi dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan modern untuk beroperasi di wilayah perairan yang masih *underfishing* atau yang selama ini dijajah nelayan asing. Semua ini akan membantu pengembangan ekonomi daerah berbasis perikanan tangkap.

Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 Ekonomi Kelautan yaitu "Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman". Target angka dasar tahun 2019 sebesar 56,11 dan tahun 2024 sebesar 73,23. Bila dibandingkan capaian tahun 2020 telah melampaui angka tahun 2019 namun masih terpaut jauh dibawah target 2024, artinya kegiatan pengelolaan sumber daya mengacu pada prinsip keberlanjutan dan sumber daya ikan yang dimanfaatkan masih dibawah batasan biologis yang aman. Untuk mengembangkan sektor perikanan tangkap tentunya tidak lepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi seperti keakuratan pengumpulan data statistik perikanan yang perlu ditingkatkan, memperhatikan status tingkat pemafaatannya, efisiensi operasi penangkapan yang dilakukan nelayan dan daerah penangkapan ikan

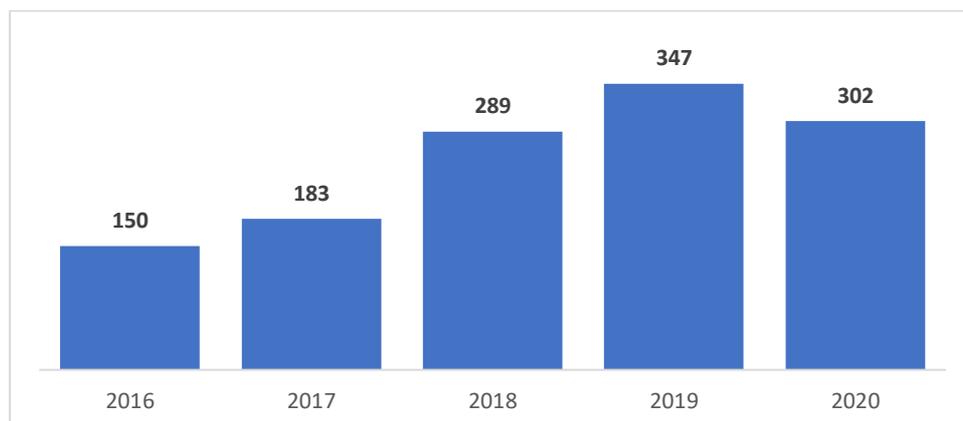
yang perlu di informasikan lebih akurat dan luas ke nelayan sekitar, fasilitas sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan/ tempat pendaratan ikan yang masih kurang, infrastruktur jalan yang belum menjangkau sampai ke desa nelayan, serta harga ikan yang belum stabil.

Dalam mendukung indikator tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan, yaitu penambahan kegiatan pendataan yang bukan lagi berbasis pada data hasil tangkapan melainkan pada data yang berbasis daerah penangkapan. Selain untuk penguatan pendataan, kegiatan ini juga bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan log book penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembandingan atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.



Gambar 6. Grafik Perkembangan Kegiatan Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2016-2020



Gambar 7. Grafik Perkembangan Kegiatan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2016-2020

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian IKU tersebut tahun 2020, antara lain:

- a. Pelaksanaan dan pembahasan Analisis Data LBPI Semester I Tahun 2020;
- b. Peningkatan validasi data log book penangkapan ikan;
- c. Rapat koordinasi penempatan observer diatas kapal long line;
- d. Rapat Koordinasi Pengembangan e-Borang;
- e. Seleksi Berkas Pelamar Observer on Board;
- f. Evaluasi pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020;
- g. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Observer TA 2020;
- h. Persiapan Pemasangan e Monitoring di Atas Kapal Perikanan;
- i. Penyampaian surat hasil verifikasi dan validasi data log book penangkapan ikan kepada pelaku usaha dan pelabuhan perikanan.
- j. Sosialisasi Kepdirjen Perikanan Tangkap tentang Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI;

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:

- Masih terdapat ketidaksinkronan antara data dan tampilan dalam aplikasi;
- Kurang optimalnya proses analisis;
- Belum semua nakhoda menggunakan e-log book;
- Keterbatasan anggaran untuk pemantauan jumlah hari layar yang lebih lama;
- Aplikasi pendataan elektronik belum bisa digunakan secara optimal;
- Masih banyak pihak daerah yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan;
- Belum optimalnya Aplikasi e-Lobster;
- Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha;
- Belum semua daerah memahami pendataan secara elektronik.

Menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut akan dilaksanakan beberapa upaya, yaitu:

- Meningkatkan penerapan LBPI di pelabuhan, melalui kontinuitas penyampaian penilaian pelabuhan;
- Meningkatkan kualitas data LBPI melalui perbaikan standar verifikasi, validasi;
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui kerjasama dengan Dit. PDK terkait rekomendasi perpanjangan izin dan integrasi Aplikasi SILOPI dengan SILAT;
- Penyempurnaan aplikasi SILOPI;
- Pelaksanaan pengolahan dan analisis LBPI;
- Percepatan penyelesaian aplikasi e- boring;
- Percepatan penempatan Observer dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang sedang darurat COVID-19;
- Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi/Pemilik kapal untuk penempatan Observer;
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka implementasi dan evaluasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan;
- Sosialisasi Kepdirjen Perikanan Tangkap tentang Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan;
- Sosialisasi dan Evaluasi mekanisme pelaksanaan pengelolaan BBL.

Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab

Sasaran Strategis-3 “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP). Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPPNRI, memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk mengelola secara optimal dan berkelanjutan.

WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Salah satu strategi arah kebijakan dari peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan di WPPNRI diperlukan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai wadah untuk penguatan peran koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di setiap WPPNRI. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya perikanan di masing-masing WPPNRI, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sesuai dengan amanah yang tercantum pada Permen KP Nomor 33/PERMEN–KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Peraturan tersebut sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengoperasionalkan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

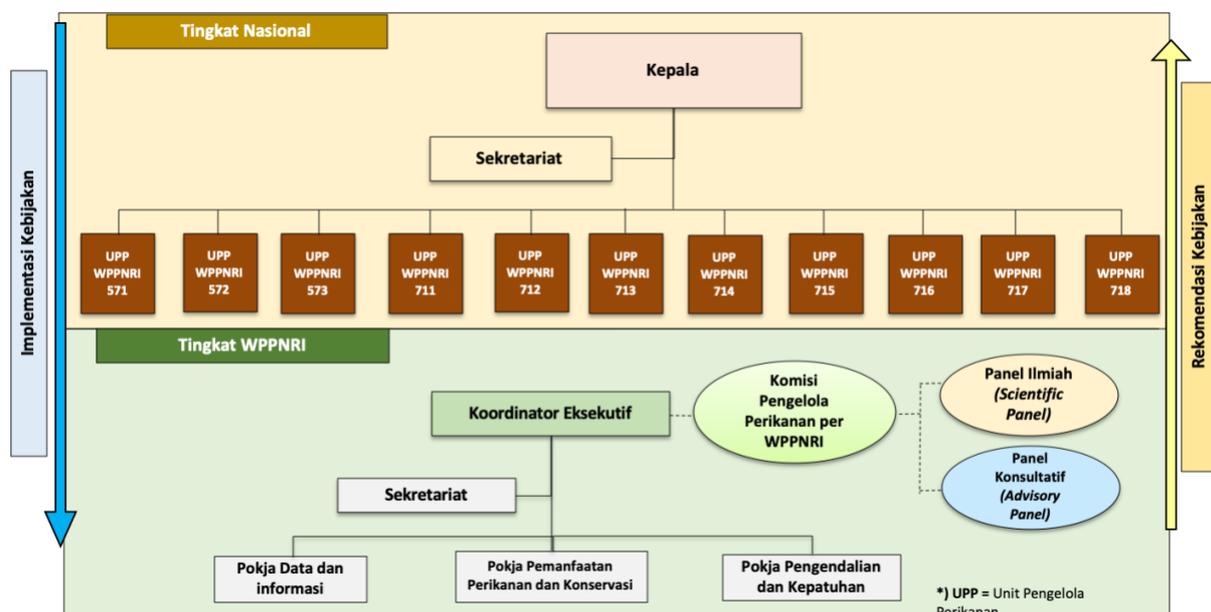
Tiga WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, yaitu:

1. WPP 711, mencakup Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, dengan ditetapkannya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui KepmenKP Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 711.
2. WPP 715, mencakup Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715.
3. WPP 718, mencakup Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Tomini Bagian Timur, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718.

Tabel 5. Capaian IKU “WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola” Tahun 2020

Sasaran Strategis-3				Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab					
IKU-3				WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	-	3	3	100	-	3	100

Capaian indikator ini telah mencapai 100% atau sama dengan target di Renstra DJPT 2020-2024 yaitu 3 WPP. Seluruh WPPNRI telah melakukan pengelolaan sumber daya ikannya sesuai dengan RPP yang telah ditetapkan. Sejak ditetapkan RPP telah menjadi acuan dalam pengelolaan WPPNRI dengan prinsip utama bahwa pengelolaan SDI berbasis WPPNRI adalah pengelolaan hulu-hilir secara terintegrasi dan berbasis kewilayahan (spasial) yang melibatkan multisteholders dan multisektor untuk mewujudkan keseluruhan aspek dari pembangunan perikanan dengan akelerasi yang lebih cepat. Bentuk penguatan LPP WPPNRI adalah melalui penerbitan Permen KP No. 33/2019 tentang LPP yang merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Kepala LPP WPPNRI. Penguatan LPP WPPNRI dimulai dengan menguatkan tata kelola dan struktur organisasi yang ada di dalamnya, yaitu unsur LPP WPPNRI di tingkat nasional/pusat, Unit Pengelola Perikanan (UPP) di tingkat WPPNRI, serta Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif.



Gambar 8. Struktur Organisasi LPP di WPPNRI

Selama ini, mekanisme koordinasi yang telah disusun di level WPPNRI belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menjadi salah satu titik fokus yang harus diperbaiki untuk optimalisasi operasionalisasi LPP WPPNRI di masa yang akan datang. Mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara luring (bertemu langsung) maupun daring (*video conference*). Terdapat beberapa pertemuan berkala yang dilaksanakan oleh LPP WPPNRI, yaitu:

- Rapat Komisi Pengelola Perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun,
- Rapat Koordinasi Komisi Pengelola perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, dan
- Rapat Koordinasi Pokja yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun sebelum pelaksanaan Rapat Komisi dan Rapat Koordinasi Komisi. Optimalisasi kelompok kerja (Pokja) LPP WPPNRI memegang peranan penting sebagai wakil instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah mendukung indikator ini di WPP 711, 715 dan 718 adalah sebagai berikut:

- Evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan.

- Operasi pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang ilegal.
- Penyuluhan terhadap nelayan agar menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- Melakukan kajian status pemanfaatan sumber daya ikan.
- Pemantauan dan evaluasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan.
- Pemantauan, dan evaluasi nelayan andon.
- Mengimplementasikan sistem perizinan terintegrasi antara pusat dan daerah berbasis alokasi.
- Melakukan pertemuan pengelola perikanan di wppnri.
- Melakukan pengukuran ulang terhadap kapal - kapal yang diduga mark down.
- Implementasi peraturan / keputusan Menteri KP terkait pelarangan pengeluaran jenis ikan tertentu.
- Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon.
- Memberikan izin rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perikanan yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait rumpon.

Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat

Sasaran Strategis-4 “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Jumlah produksi perikanan tangkap. Langkah-langkah strategis yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas dan daya jangkau armada penangkapan ikan sehingga mampu melakukan penangkapan ikan di perairan yang lebih jauh, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan perumusan sistem koordinasi pengawasan antar instansi yang menangani serta pembangunan pelabuhan perikanan yang diarahkan menjadi basis usaha penangkapan ikan.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusat Data dan Informasi KKP. Adapun capaian tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-4				Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat					
IKU-4				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
6,58	6,89	7,12	7,53	7,70	7,70	100	2,26	8,02	96,01

Realisasi produksi tangkap tahun 2020 sebesar 7,70 juta ton atau mencapai 100,00% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 7,70 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 92,65% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,14 juta ton dan sisanya sebesar 7,35%

atau mencapai 0,57 juta ton berasal dari perairan umum daratan. Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 170.543 ton atau 2,26% dari tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 2,23% dan perairan umum daratan sebesar 2,71%.

Tabel 7. Perbandingan target tahun 2020 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya

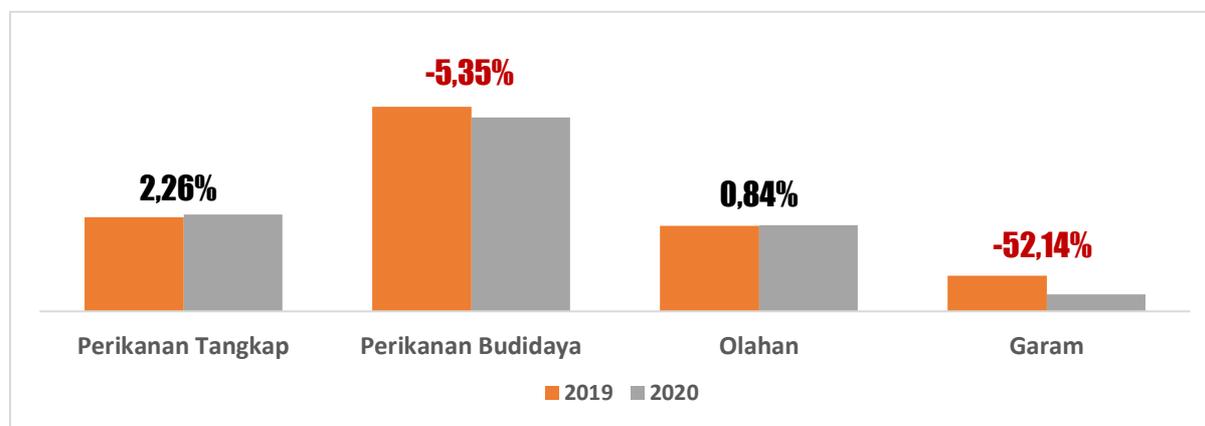
Perairan	Realisasi Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Laut	6.115.469	6.425.114	6.701.834	6.981.505	7.137.122
Perairan umum	464.722	467.821	659.287	551.605	566.531

* angka sementara



Gambar 9. Grafik Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2020 per triwulan

Jika dilihat pada grafik diatas, terjadi penurunan terhadap jumlah produksi perikanan tangkap baik dari perairan laut maupun perairan darat pada triwulan 2 dan 3. Namun secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 1,11%. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi perikanan tangkap adalah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada Maret-April 2020 terjadi penurunan konsumsi ikan yang terbatas karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh wilayah Indonesia sehingga permintaan pasar berkurang dan disisi lain harga BBM yang merupakan 70%-80% dari biaya operasional melaut tidak turun.



Gambar 10. Grafik Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, Produk Olahan dan Garam pada Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan grafik diatas, capaian produksi perikanan tangkap apabila dibandingkan dengan produksi lainnya di sektor kelautan dan perikanan seperti produksi perikanan budidaya, produksi olahan dan garam memiliki pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 2,26% dan produk olahan sebesar 0,84%. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya dan garam mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Adapun rendahnya produksi garam dikarenakan musim hujan yang berkepanjangan sehingga banyak petani garam yang gagal panen.

Peningkatan terhadap pemanfaatan perikanan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap harus berbasis pada potensi sumber daya ikan harus mempertimbangkan kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Konsep pengelolaan perikanan berbasis WPP harus didukung dengan berbagai perlengkapannya baik dari aspek fisik maupun kelembagaannya. Adapun bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Umum Perhitungan Penggunaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum tersedia). Sampai dengan saat ini kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Lokasi kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

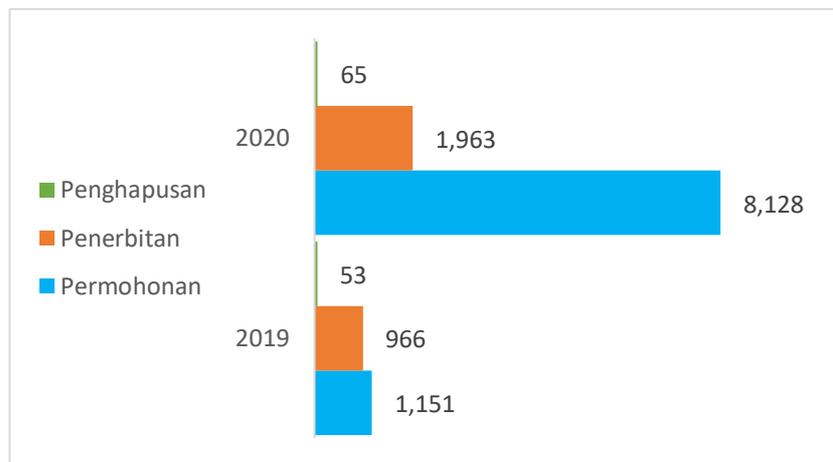
No	Lokasi	Bentuk Kegiatan
1.	PPS Nizam Zachman	Konsultan Perencanaan Sarana Bantu Navigasi Pelayanan (Rambu Suar)
2.	PPS Belawan	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	PPS Kendari	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
4.	PPS Bitung	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5.	PPS Cilacap	Konsultan Perencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Cilacap
6.	PP Merauke	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Perencana Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke • Pengadaan <i>Cold Storage</i> • Pembersihan Lahan untuk rencana jalan Kawasan • Pengembangan dan pembangunan fasilitas PP Merauke (<i>levelling</i> lahan industri)
7.	PP Cikidang	Perencanaan Masterplan, Detail Engineering Design (DED) Jalan Kawasan dan Drainase Lingkungan Pelabuhan Perikanan Cikidang
8.	PPN Karangantu	Bolder dan Fender, Instalasi Pabrik Es, Pemeliharaan Kompresor, Cold Storage dan ABF, Bengkel, SWRO, Pagar Keliling, Rehab Turap, Urugan dan Pematangan Tanah.
9.	PPN Tanjungpandan	Pemeliharaan Pabrik Es (ICE PAQ), Pemeliharaan Gedung Administrasi, Pemeliharaan Balai Pertemuan Nelayan

No	Lokasi	Bentuk Kegiatan
10.	PPN Sibolga	Pembangunan jalan akses menuju IPAL
11.	PPN Sungailiat	Pekerjaan interior ruang pelayanan terpadu, rehab rumah dinas, pekerjaan pemeliharaan pagar Kawasan
12.	PPN Kejawan	Rehab jaringan listrik, pembuatan plat duiker dan perkerasan halaman mess operator, pemasangan paving block halaman gudang perbaikan jarring, pembuatan saluran drainase bagian barat, pemasangan paving blok gedung pelayanan, rehabilitasi tempat pembuangan sampah, perkerasan jalan area pengembangan bagian timur, perkerasan jalan area pengembangan bagian barat, rehab trotoar jalan masuk utama dan landscaping, rehab pagar mess operator, perkerasan jalan wisata bahari, rehab jaringan air bersih, rehab jalan kompleks, pembangunan ruang arsip
13.	PPN Palabuhanratu	Pengadaan pompa portable pemadam kebakaran, pemasangan portal otomatis
14.	PPN Brondong	Parkir beratap roda 2, rehab lampu suar/rambu suar, rehabilitasi jaringan listrik, bangunan lampu penerangan kolam Pelabuhan, rehabilitasi sarana cctv Pelabuhan, perencanaan pembangunan kios PKL, perencanaan penambahan pintu akses TPI Higienis, Perencanaan pengerukan kolam Pelabuhan tahap I, perencanaan jalan akses outlet pengepakan ikan, perencanaan akses pejalan kaki dan pembatas jalan, perencanaan mess operator, pengadaan sumber air asin, saranan pemantauan operasional Pelabuhan, inovasi pelayanan cepat
15.	PPN Prigi	Instansi pengolahan limbah cair <i>Cold Storage</i> , perencanaan instalasi pengolahan limbah cair <i>Cold Storage</i> , pengawasan sumur bor dan instalasi, perencanaan rehab tempat keranjang ikan, perencanaan taman dan Kawasan kantor Pelabuhan, perencanaan rehab mushola, perencanaan rehab breakwater barat
16.	PPN Pekalongan	Rehab talud batu Kawasan wisata bahari, peninggian revetment beton Kawasan wisata bahari, pembongkaran paving dan peninggian Kawasan wisata bahari, dan pemasangan paving Kawasan wisata bahari.
17.	PPN Pemangkat	Dermaga jetty (rehab dermaga kayu)
18.	PPN Ternate	Pembangunan pos pas masuk dan landscape
19.	PPN Ambon	Rehab Gedung pabrik es, pembuatan kanopi portal/membran, pembuatan gazebo (rumah bengong), pelebaran jalan masuk dan keluar trotoar pejalan kaki, dan pembuatan atm center
20.	PPN Tual	Pembangunan Gedung mushola, pembangunan Gedung pelayanan publik, dan rehabilitasi Gedung kantor administrasi pelabuhan
21.	PPN Pangambengan	Penataan jaringan listrik dan lampu dermaga, perbaikan Gedung TPI, peningkatan kualitas drainase, trotoar, gapura dan pos masuk, pembuatan jalan beton dalam lahan industri (<i>cold storage</i>), pembangunan lampu navigasi penanda pintu masuk kolam labuh, dan rehab dermaga korosif (<i>grouting</i>) tahap I
22.	PPN Kwandang	Penyusunan dokumen lingkungan, rehab Gedung penyimpanan alat berat dan jalan akses areal industri

2. Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

Pendaftaran kapal perikanan merupakan bentuk pencatatan kapal perikanan yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan – perubahan yang terjadi. Kegiatan ini sangat penting dalam upaya penataan kapal perikanan dan erat kaitannya dengan kepatuhan para pelaku usaha dalam perizinan berusaha. Dengan adanya Buku Kapal Perikanan (BKP) maka penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak perlu melampirkan grosse akta, data kapal, rencana umum kapal dan spesifikasi alat penangkap ikan yang digunakan. Tujuan akhir dari pendaftaran kapal adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan di Indonesia.

Berbagai inovasi terus dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Terhitung sejak Oktober 2019, DJPT menyederhanakan dan memudahkan proses layanan pendaftaran kapal perikanan melalui sistem daring (online) e-service pada laman kapal.kkp.go.id. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2019, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.151 permohonan pendaftaran BKP dengan penerbitan sebanyak 966 BKP dan penghapusan terhadap 53 BKP. Sedangkan sampai dengan 02 Oktober 2020, jumlah permohonan pendaftaran BKP sebanyak 8.128 permohonan dengan penerbitan sebanyak 1.963 BKP dan penghapusan 65 BKP.



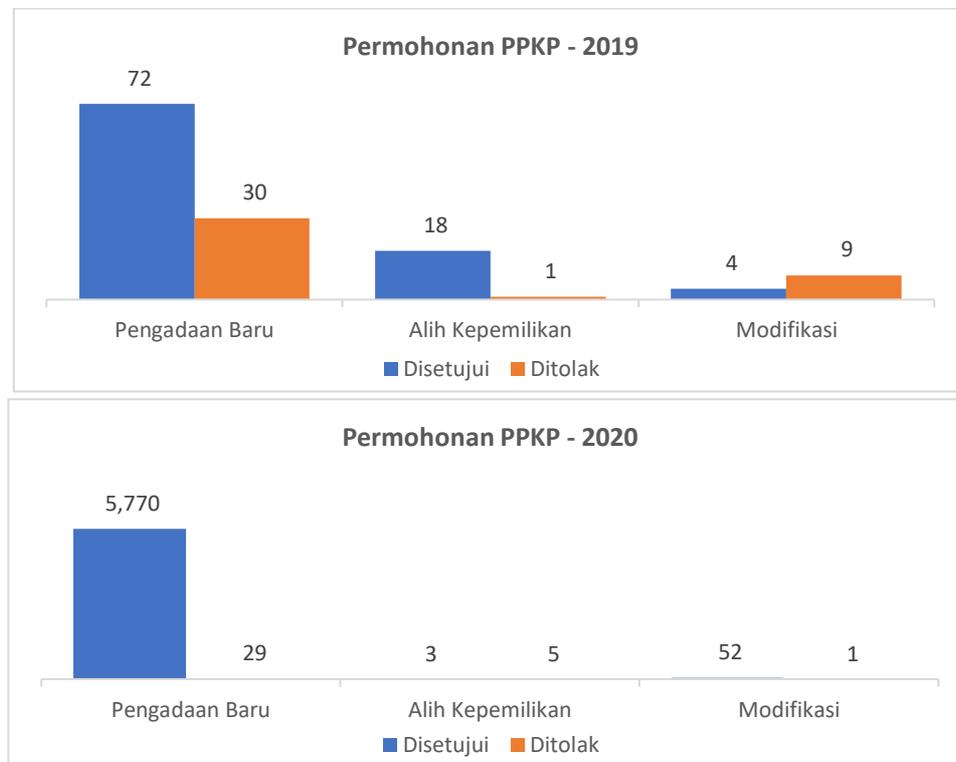
Gambar 11. Grafik perkembangan Buku Kapal Perikanan

Sejalan dengan upaya penataan kapal perikanan, pemeriksaan fisik kapal perikanan dilakukan dalam rangka penerbitan dan/atau perubahan SIPI dan/atau SIKPI dan/atau penerbitan BKP. Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap 3.238 unit kapal perikanan dan sampai dengan 02 Oktober sejumlah 1.975 unit kapal perikanan telah dilakukan pemeriksaan fisik.

Sementara itu, untuk Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang merupakan surat yang diberikan kepada pemilik SIUP yang mendapatkan persetujuan untuk membangun, membeli, dan memodifikasi kapal perikanan pada tahun 2019 sebanyak 134 permohonan dengan rincian 94 permohonan disetujui dan 40 permohonan ditolak.

Sedangkan sampai dengan 02 Oktober 2020 pasca ditetapkannya diskresi berdasarkan instruksi MKP nomor B-255/MEN-KP/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan nomor B-484/MEN-KP/IX/2020 tanggal

21 September 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan jumlah permohonan PPKP. Tercatat sebanyak 5.860 permohonan dengan rincian 5.825 permohonan disetujui dan 35 permohonan ditolak yang secara rinci sebagaimana dalam grafik berikut.

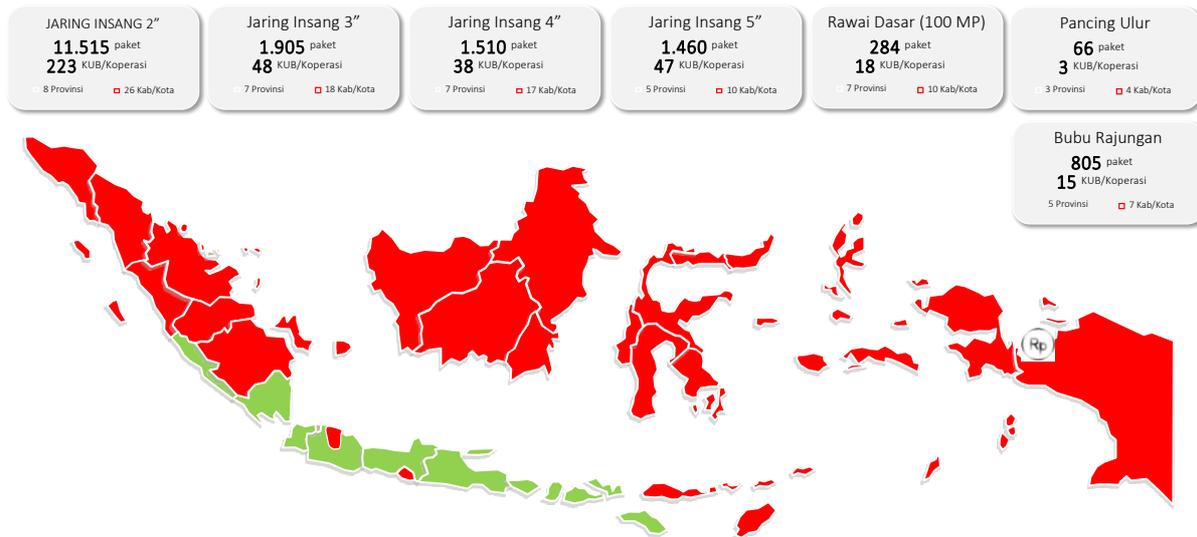


Gambar 12. Grafik perkembangan capaian rekomendasi PPKP

3. Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun

Bantuan alat penangkapan ikan merupakan salah satu program yang juga disusun untuk mempertahankan keberlangsungan usaha nelayan kecil, khususnya nelayan kecil pada masa pandemi ini. Sasaran dari program bantuan ini adalah koperasi nelayan dan KUB dengan rencana penyaluran bantuan sejumlah 100.000 paket API senilai Rp. 50 miliar. Mekanisme pelaksanaan diatur dalam Kepmen KP No. 70/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2020.

Adapun jenis bantuan API ini terdiri dari jaring insang, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar yang dialokasikan untuk mendukung usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran < 5GT dan kapal berukuran > 5GT sampai dengan 10 GT. Sampai dengan Desember 2020 telah tersalurkan 17.545 paket API terhadap 338 KUB/Koperasi penerima di 33 Kab/Kota pada 8 Provinsi hasil usulan bantuan sarana penangkapan ikan reguler dengan sebaran pada gambar berikut.



Gambar 13. Sebaran Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2020

4. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi

Pemerintah semakin memahami bahwa pekerjaan di atas kapal penangkap ikan merupakan jenis pekerjaan dengan risiko tinggi yang ditanggung oleh Awak Kapal Perikanan (AKP). Oleh karena itu, Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja di atas kapal. Dengan mengadopsi aturan ILO C-188, upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak – hak awak kapal dan pekerja pada sektor perikanan diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.

Melalui fasilitasi, koordinasi, dan sinergi menyeluruh dengan lembaga asuransi dan para pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan di unit pelaksana teknis baik pusat maupun daerah, pada tahun 2019 sebanyak 103.175 orang AKP telah terlindungi dengan asuransi dan sebanyak 30.316 orang AKP telah memiliki perjanjian kerja laut.

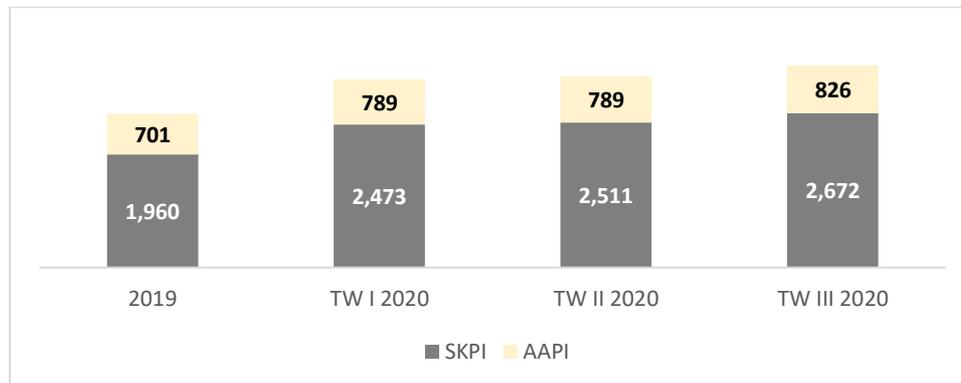
Guna memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan maka dengan adanya perjanjian kerja laut, secara langsung AKP memiliki jaminan perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi, serta dokumen AKP. Sementara itu, sampai dengan September 2020 telah dilaksanakan upaya perlindungan melalui asuransi terhadap 128.131 orang AKP dan penerapan perjanjian kerja laut terhadap 23.502 orang AKP.

Penangkapan Ikan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dalam pengolahan ikan hasil tangkapan tidak dapat dilepaskan dari pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

Salah satu persyaratan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, diperlukan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh awak kapal/nelayan untuk dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai dengan kaidah keamanan pangan. Sedangkan sertifikasi Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI)

merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh awak kapal/nelayan untuk dapat mengoperasikan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan baik dan efektif sesuai kaidah FAO.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pelatihan peningkatan keahlian dan keterampilan bagi AKP/nelayan dengan penerbitan sebanyak 1.960 SKPI dan 701 AAPI. Sedangkan sampai dengan September 2020 telah diterbitkan sebanyak 2.672 SKPI dan 826 AAPI sebagai upaya peningkatan keahlian dan keterampilan AKP/nelayan.



Gambar 14. Capaian kegiatan sertifikasi awak kapal perikanan tahun 2019 dan per Triwulan tahun 2020

Sesuai dengan amanat Permen KP No.7/PERMEN-KP/2016, sebagai otoritas kompeten sertifikasi AKP Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan bimtek kompetensi layak tangkap dan kompetensi layak simpan baik melalui anggaran pusat maupun fasilitasi penyelenggaraan Bimtek oleh DKP Provinsi, 20 Pelabuhan Perikanan, 19 SMK bidang Kelautan dan Perikanan serta 2 lembaga pelaksana swasta. Secara menyeluruh, sejak tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 10.068 SKPI dan sebanyak 5.610 sertifikat AAPI.

5. Penataan perizinan usaha penangkapan ikan

SILAT memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari menjadi 1 jam. Peralpnya, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha. Dalam mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri. Inovasi ini merupakan langkah yang dilakukan KKP sejalan dengan visi-misi Presiden Joko untuk menyederhanakan mekanisme perizinan.

Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam secara online diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2019. Sampai dengan saat ini SILAT telah berhasil menerbitkan 1.787 SIUP, 4.067 SIPI dan 286 SIKPI.

Intergrasi sistem perizinan pusat dan daerah dilaksanakan melalui aplikasi SIMKADA. SIMKADA adalah sistem aplikasi untuk pengolahan dan pengelolaan data izin kapal daerah ukuran <30 GT, data & informasi izin yang diintegrasikan adalah data SIUP, SIPI/SIKPI, Andon, BPKP, pelaksana penerbit izin PTSP & DKP Provinsi/Kab/Kota. Sampai dengan saat ini telah bergabung dengan data layanan

perizinan di 32 Provinsi. Samai dengan saat ini jumlah perizinan yang terdata dalam aplikasi SIMKADA telah terbit 11.419 SIPI, 784 SIKPI dan 17.750 Buku Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP).

Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

Sasaran Strategis-5 “Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap. Selama lima tahun yaitu tahun 2015-2020, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan terluar.

Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Adapun Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui PermenKP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan.

Tabel 9. Capaian IKU “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

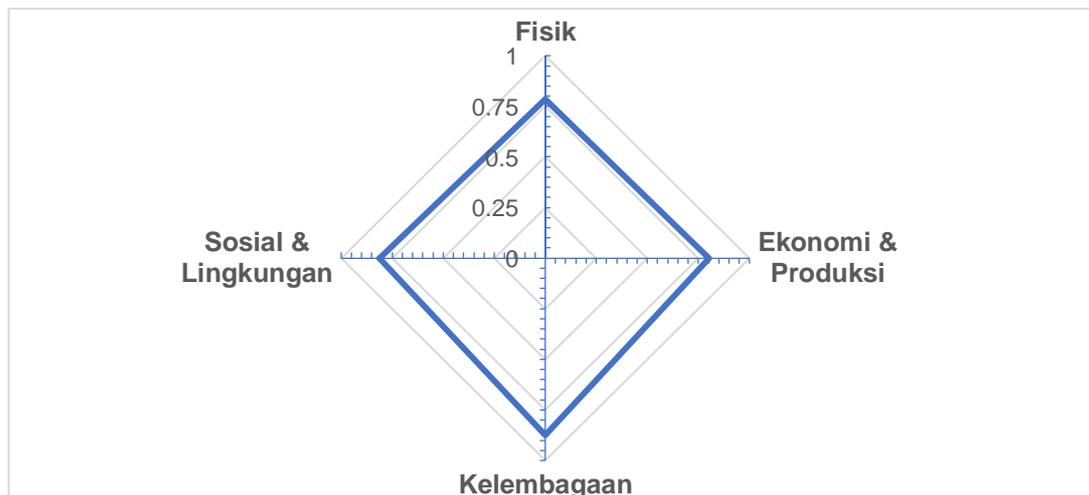
Sasaran Strategis-5				Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri					
IKU-5				Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	4	4	4	4	4	100	0	4	100

Nilai Kemandirian SKPT didapatkan dari rata-rata nilai tingkat kemandirian SKPT di masing-masing lokasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab DJPT Tahun 2020

No	SKPT	Realisasi Nilai Kriteria/Aspek				Rata-Rata	Tingkat Kemandirian
		Fisik	Ekonomi & Produksi	Kelembagaan	Sosial & Lingkungan		
1	Natuna	0,94	0,9	0,93	0,96	0,93	Pra Mandiri 4
2	Merauke	0,99	0,96	0,95	0,88	0,95	Pra Mandiri 4
3	Saumlaki	0,65	0,75	0,78	0,85	0,76	Pra Mandiri 4
4	Sebatik	0,92	0,75	0,83	0,65	0,79	Pra Mandiri 4
Rata-rata		0,88	0,84	0,87	0,84	0,86	Pra Mandiri 4

Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa SKPT Merauke memiliki nilai yang terbesar sebesar 0,95 dengan rincian aspek yang terbesar sampai terkecil yaitu aspek fisik 0,99, aspek ekonomi dan produksi 0,96, aspek kelembagaan 0,95 dan aspek sosial dan lingkungan 0,88. Namun secara keseluruhan aspek yang terbesar berpengaruh adalah aspek fisik sebesar 0,88 dan aspek yg paling rendah adalah aspek ekonomi dan produksi serta sosial dan lingkungan sebesar 0,84.

**Gambar 15.** Grafik radar rata-rata penilaian SKPT tanggung jawab DJPT tahun 2020

Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan. Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan pembinaan dan pembangunan di 4 lokasi yaitu SKPT Natuna di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, SKPT Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, SKPT Merauke Kabupaten Merauke dan SKPT Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

1. SKPT Natuna, Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna menjadi salahsatu kabuapten terluar yang jauh dan berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam. Perairan natuna masuk ke WPP NRI 711 yang menyimpan potensi sumberdaya ikan yang besar yang diperkirakan sebesar 1,143,341 Ton/ tahun (Komnas Kajiskan, 2016). Masyarakat natuna menjadikan laut sebagai masa depan karena dari lautlah mereka mendapatkan pemasukan setiap harinya.

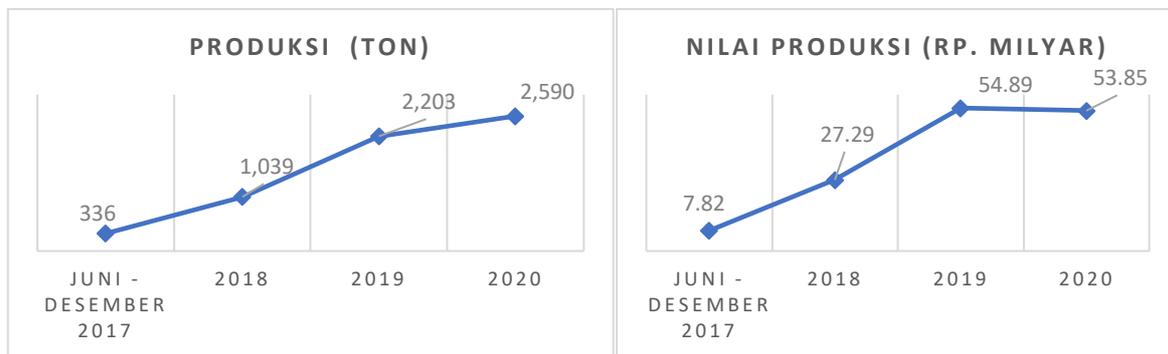
Perairan natuna telah lama menjadi area illegal fishing kapal berbendera asing (Vietnam, Thailand, RRT). Hal ini menjadi ancaman atas kedaulatan perairan Indonesia yang memanfaatkan

sumberdaya ikan tanpa adanya perjanjian bilateral. Sederet kapal bendera asing telah banyak diamankan oleh pada penegak hukum perairan Indonesia untuk memberikan efek jera nelayan asing.

Pemilihan Natuna sebagai lokasi SKPT untuk meningkatkan perhatian negara dalam pembangunan sektor perikanan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu menempatkan kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan perbatasan dengan pangkalan di wilayah natuna agar dekat dengan daerah penangkapan.

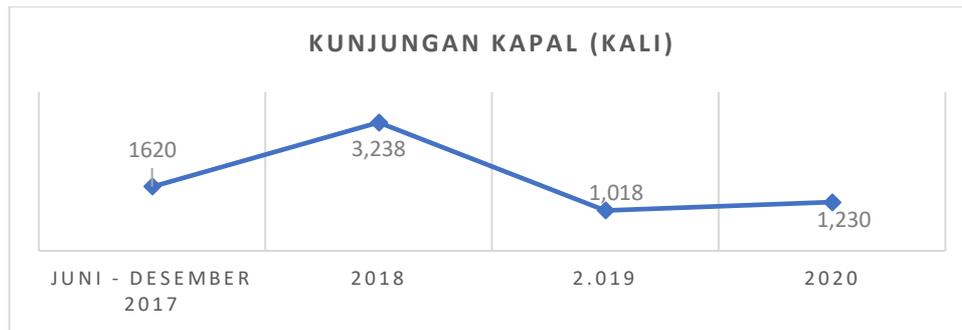
SKPT Natuna dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa yang telah dibangun dibangun mulai tahun 2015 dengan lahan reklamasi seluas 3 Ha dari target 9 Ha. Secara bertahap pembangunan lahan sampai dengan fasilitas dasar telah lengkap dari tahun 2015-2016. Fasilitas SKPT Natuna yang telah tersedia antara lain : Dermaga Kapal > 30 GT, Dermaga Kapal < 30 GT, Integrated Cold Storage 200 Ton, Ice Flake Machine 2 unit, Tempat Pemasaran Ikan, Gedung Perbaikan Alat Penangkap Ikan, SPBN, Jalan kawasan, Tempat Ibadah Masjid, Mess Pegawai, Kantor Pelabuhan Perikanan, mesin penyediaan air bersih BWRO.

Ada empat hal yang hendak dicapai dari pembangunan SKPT Natuna. Pertama SKPT diharapkan bisa menumbuhkan sistem bisnis perikanan di Natuna. Kedua, keberadaan SKPT diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat Natuna. Ketiga, SKPT bisa menjadi solusi pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan penduduk baik di Natuna dan daerah lain di Indonesia, dan yang terakhir, SKPT diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Natuna.



Gambar 16. Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Natuna tahun 2017-2020

Pada awal operasional PP Selat Lampa Natuna Tahun 2017 (Juni-desember) produksi 336 Ton nilai Rp. 7,82 Milyar. Tahun 2018 produksi 1.039 ton nilai produksi Rp. 27,29 Miliar. Produksi tahun 2019 mencapai 2.203 Ton dengan nilai produksi Rp. 54,89 Milyar. Kemudian pada 2020 produksi mencapai 2.590 Ton dengan nilai produksi Rp 53,85 Milyar. Meningkatnya produksi tahun 2020 disebabkan makin banyaknya kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikannya di PP Selat Lampa yang diimbangi dengan makin meningkatnya layanan seperti BBM, air bersih dan es. Namun dari sisi nilai produksi 2020 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 17. Grafik kunjungan kapal di SKPT Natuna tahun 2017-2020

Dari sisi kunjungan kapal, pada awal operasional enam bulan terakhir tahun 2017 PP Selat Lampa kunjungan kapal mencapai 1.620 (kali), tahun 2018 naik mencapai 3.238 (kali) tahun 2019 mencapai 1.018 (kali) dan pada tahun 2020 mencapai 1.230 (kali). Kunjungan kapal dari tahun 2018 didominasi ukuran <10 GT dibanding tahun 2019 lebih banyak.

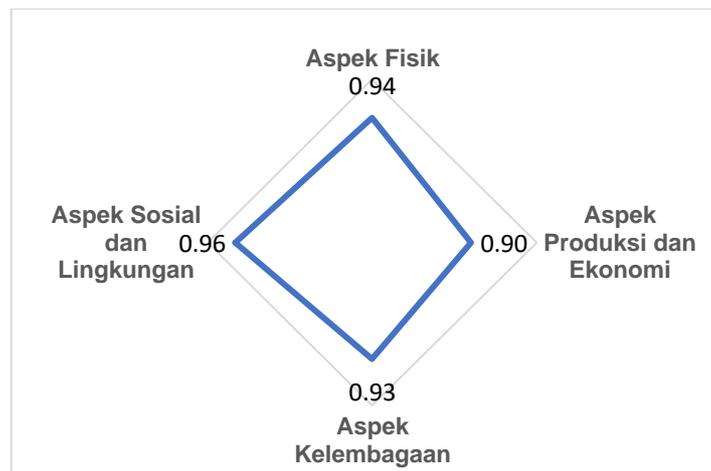
Pembangunan SKPT Natuna telah memberikan dampak positif: (1) nelayan mendapat akses pemasaran hasil tangkapan ikan melalui BUMN Perindo yang berlokasi di PP Selat Lampa yang mampu membeli ikan dengan harga yang lebih kompetitif, (2) peningkatan volume produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna, (3) peningkatan serapan tenaga kerja di kawasan PP Selat Lampa, dan (4). Tumbuhnya koperasi nelayan perikanan.

Kendala dan permasalahan yang ada di SKPT natuna : (1). Terdapat kerusakan BWRO sehingga debit produksi tidak optimal (2). Penyediaan es balok untuk nelayan yang akan melaut masih kurang (3). Belum adanya rumah singgah nelayan untuk kapal penangkap ikan yang berpangkalan di PP Lampa (4). Belum ditetapkannya PP Selat Lampa sebagai UPT yang mandiri dibawah Ditjen Perikanan Tangkap.

Hibah JICA untuk SKPT Natuna direncanakan akan melakukan pembangunan: (1) pembangunan lanjutan pelabuhan perikanan selat lampa: kolam kapal < 30 GT, (2) penambahan dermaga kapal < 30 GT, cold Storage 100 Ton, (3) pabrik es dan IPAL, dan (4) pembangunan Pasar ikan Ranai di Kota Ranai, Natuna.

Keberadaan SKPT Natuna yang berada di selat Lampa ini diharapkan bisa mendorong para pelaku usaha sektor perikanan nasional bisa mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas- fasilitas yang tersedia untuk usaha mereka di wilayah ini. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa dapat segera diramaikan aktifitas perikanan bagi kapal-kapal izin daerah Provinsi Kepulauan Riau dan izin pusat dan menjadikan pelabuhan pangkalan utama bagi kegiatan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara).

Kehadiran para pelaku usaha perikanan nasional di kawasan SKPT Natuna tentunya akan menjadikan potensi sumber daya laut yang ada di wilayah ini bisa tergali dengan maksimal. Perekonomian masyarakat lokal pun turut meningkat sehingga menghadirkan pemerataan ekonomi nasional. Dan yang paling terpenting adalah kedaulatan negeri ini bisa terjaga.



Grafik 18. Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Natuna Tahun 2020

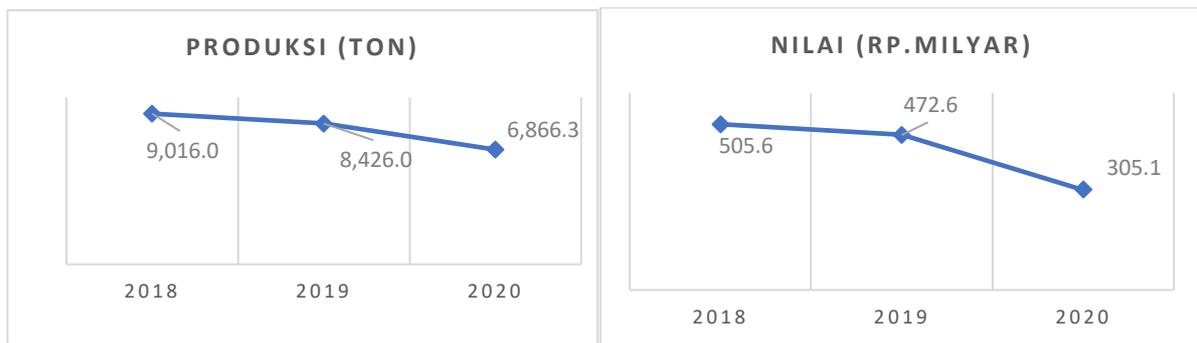
Berdasarkan gambar diatas hasil survei kemandirian SKPT pada aspek fisik pada tahun 2020 mencapai 0,94. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sarana fisik yang telah dibangun telah digunakan dengan baik (terdapat aktivitas penggunaan sarana yang disediakan). Untuk aspek produksi dan ekonomi mencapai 0,90. Hal ini didukung dengan meningkatnya skala penggunaan sarana seperti dermaga, ice flake, TPI, dan Integrated Cold Storage (ICS). Pada aspek kelembagaan mencapai 0,93 dimana kondisi kelembagaan PP Selat Lampa telah memiliki DIPA Satker, namun belum menjadi Satker Mandiri serta belum memiliki kepala pelabuhan perikanan defenitif. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai 0,96.

Pelabuhan Perikanan Natuna saat ini telah memberikan dampak dimana kegiatan di Pelabuhan telah menyerap tenaga kerja lokal seperti para pekerja pada pengolahan ikan dan gudang pembekuan yang dikelola BUMN Perum Perindo. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 (≥ 0.75 dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

2. SKPT Sebatik, Kalimantan Utara

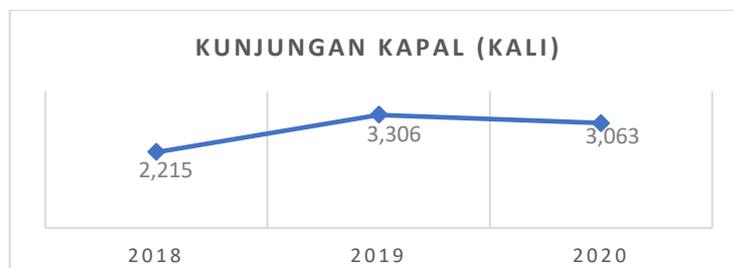
Penetapan Kabupaten Sebatik selain memfungsionalkan pelabuhan perikanan sebatik yang telah lama tidak operasional juga menjadikan pelabuhan pengecekan ikan keluar masuk Indonesia menuju dan dari Malaysia. Berdasarkan Keputusan MKP Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perairan nunukan berada di WPP 716. Potensi perikanan tangkap diperkirakan 597.139 ton Per tahun. Perikanan pelagis kecil dan pelagis besar pada urutan pertama dan kedua potensi terbesar. Adapun pembangunan SKPT Sebatik Kabupaten Nunukan telah dicanangkan sejak 2016 agar tercipta pertumbuhan industri perikanan di wilayah Indonesia untuk menyaingi Tawau Malaysia agar Kabupaten Nunukan menjadi kota yang industri perikanan yang mandiri.

Fasilitas yang telah tersedia di PPI Sebatik antara lain : Lahan 7.650 M2 , Trestel 7 x 750 m, Causeway 7 x 250 m, Jalan kawasan, Drainase, Kantor Administrasi dan Pelayanan Terpadu (15 x 12 m), Tempat Pelelangan Ikan/TPI (10 x 15 m), Integrated Cold Storage/ICS (luas 400 m2) Kapasitas 50 ton, Tempat Perbaikan Jaring Nelayan (20 x 10 m), Bangunan Ice Flake Machine (10 x 8 m). Fasilitas penunjang : Toilet Umum (10 x 5 m), Kedai Nelayan (8 x 9 m), Bengkel Nelayan (8 x9 m), Groundtank (10 x 8 m), Mess Karyawan (6 x 12 m), Rumah Karyawan (3 unit), Pos Jaga (3 x 2 m).



Gambar 19. Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Sebatik tahun 2018-2020

Produksi PP Sebatik tahun 2018 mencapai 9.016 ton nilai Rp. 505,6 Milyar. Tahun 2019 produksi mencapai 8.426 ton dan nilai Rp. 472,5 Milyar. Sampai tahun 2020 produksi mencapai 6.866,3 ton dan nilai Rp. 305,1 Milyar. Terjadi penurunan pada tahun 2020 disebabkan menurunnya kegiatan operasional penangkapan diakibatkan permintaan dan harga ikan masa pandemi menurun.



Gambar 20. Grafik kunjungan kapal di SKPT Sebatik tahun 2018-2020

Kunjungan kapal tahun 2018 mencapai 2.215 kali tahun 2019 mencapai 3.306 kali dan tahun 2020 mencapai 3.063 kali. Terjadinya penurunan kegiatan penangkapan pada periode tahun 2020 dipengaruhi berkurangnya kegiatan penangkapan nelayan, menurunnya daya beli masyarakat Nunukan termasuk menurunnya permintaan pasar Malaysia dan selektifnya lalu lintas ikan masuk dari Indonesia ke Tawau Malaysia selama pandemi covid 19.

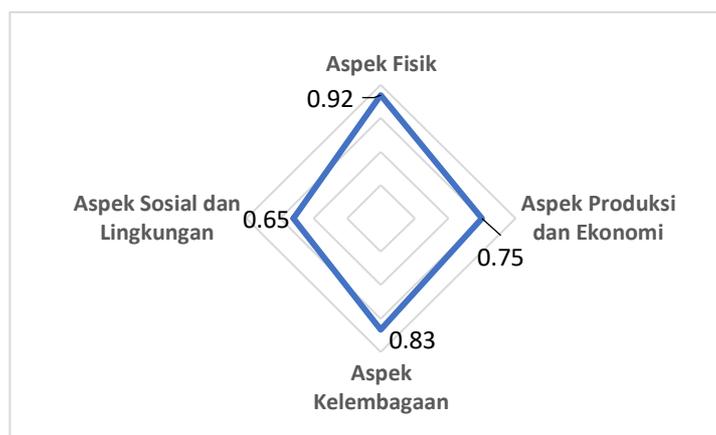
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sebatik memberikan dampak yang telah dirasakan antara lain: (1) nelayan Sebatik telah melakukan kegiatan pembongkaran di PPI Sebatik, (2) tumbuhnya kegiatan bisnis perikanan dan non perikanan, (3) Berjalannya kegiatan industri perikanan di PPI Sebatik, (4) terdatanya semua komoditas perikanan yang keluar masuk di PPI Sebatik, (5) kegiatan pelayanan berjalan dengan baik antara lain: a) pelayanan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran; b) pelayanan karantina ikan (BKIPM); c) pelayanan pengawas perikanan (PSDKP); d) pelayanan kantor kesehatan pelabuhan (KKP); e) pelayanan imigrasi; f) pelayanan bea dan cukai; g) pelayanan perizinan daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kaltara; h) pelayanan perizinan usaha perikanan oleh PTSP Propinsi Kaltara; dan i) pelayanan surat keterangan asal ikan oleh Dinas Perdagangan Nunukan.

Permasalahan : Penyerahan Sertifikat Tanah yang baru (Pihak yang terlibat : BPN Nunukan dan Pemda Kab. Nunukan), Pemerintah Provinsi Kaltara (Dinas KP) hingga saat ini belum menyerahkan asetnya atas sarana dan prasarana (fasilitas pelabuhan perikanan) yang telah dibangun di SKPT Sebatik. Dermaga tidak memiliki trestel "T" dan tempat sandar kapal permanen, Dengan panjang dermaga 750 mtr msh berpengaruh thdp pasang/surut air laut untuk kapal ukuran >20GT, Belum ada

instalasi perpipaan di sepanjang dermaga guna menyalurkan perbekalan air tawar dll dari darat ke dermaga/kapal. SKPT belum memiliki SPDN diareal pelabuhan.

Untuk mengoptimalkan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, terdapat beberapa hal upaya yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain :

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik;
- Peningkatan Pemanfaatan Lahan dan Pengoperasionalan Fasilitas Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik;
- Dukungan Lintas Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Peningkatan Mutu, Keamanan Hasil Perikanan, Pemasaran dan Pengawasan Hasil Produksi di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik; dan
- Dukungan Lintas Sektor dalam Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, antara lain :
 - Dukungan dari Dinas KP Kab. Nunukan dan Dinas KP Provinsi Kalimantan Utara untuk perijinan terpadu kapal > 10 GT;
 - Perlu segera menyusun Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - Pembangunan Pabrik Es di SKPT Sebatik dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara SKPT Sebatik dengan Pihak Swasta;
 - Perlu dilakukan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam rangka meningkatkan akses Permodalan.



Gambar 21. Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Sebatik Tahun 2020

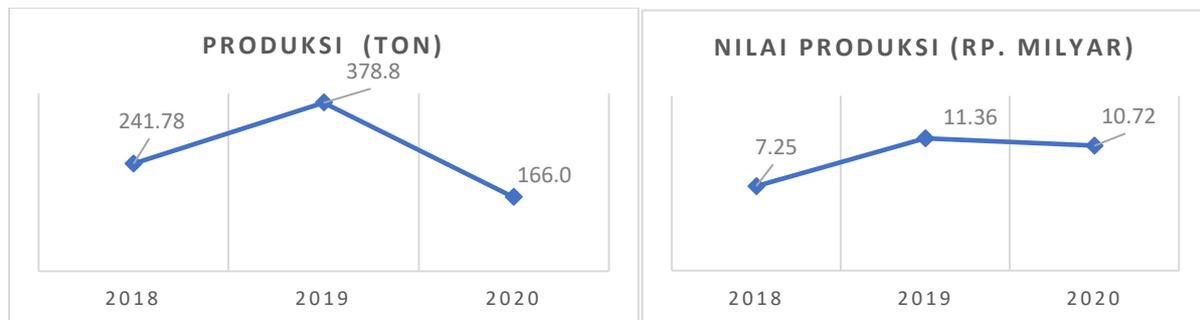
Tingkat kemandirian SKPT Sebatik pada tahun 2020 ditergetkan pada level Pra Mandiri tingkat 4. Pada tahun 2019 Hasil survei kemandirian SKPT , pada aspek fisik mencapai 0,92. Hal ini dikarenakan sarana fisik yang telah dibangun pada tahun 2019 telah digunakan dengan baik (terdapat aktivitas penggunaan sarana yang disediakan). Untuk Aspek produksi dan ekonomi mencapai 0,75. Hal ini didukung dengan meningkatnya skala penggunaan sarana seperti dermaga, ice flake, TPI, Integrated Cold Storage, dan kegiatan ekspor yang sudah dilaksanakan setiap hari menuju Malaysia. Pada aspek kelembagaan mencapai 0,83 dimana kondisi kelembagaan PP Sebatik yang merupakan lokasi SKPT Sebatik telah memiliki DIPA Satker namun belum menjadi satker mandiri yang telah mempunyai kepala pelabuhan perikanan. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai angka 0,65. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 (≥ 0.75 dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

3. SKPT Saumlaki, Maluku

Tujuan pembangunan SKPT Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP 718 dan 714 yang belum optimal. Potensi sumberdaya ikan di kedua WPP tersebut diperkirakan sebesar 1.992.730 Ton/tahun dan 431.069 Ton/tahun (Komnas Kajiskan, 2016). WPP 718 secara dominan ikan ikan pelagis kecil, ikan demersal dan pelagis besar. Sedangkan WPP 714 secara dominan mempunyai potensi Pelagis kecil, Ikan karang dan ikan demersal. Dengan posisi yang strategis ini, perikanan tangkap di Kepulauan Tanimbar sangat memungkinkan dikembangkan menjadi lumbung ikan Indonesia. Kegiatan SKPT Saumlaki dipusatkan pada Pelabuhan Perikanan Ukurlaran.

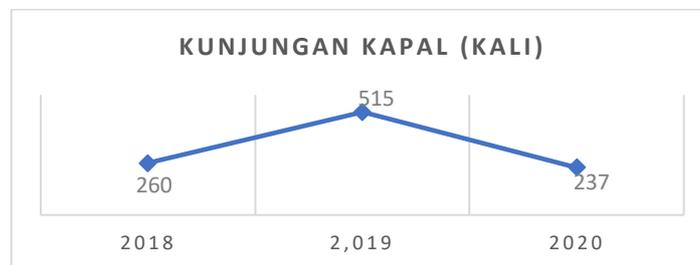
Berbagai jenis ikan dapat ditemukan di Perairan Tanimbar seperti Ikan karang, Pelagis besar, pelagis kecil, crustcea dan hewan lunak. Namun untuk aktivitas penangkapan ikan masih terikat sasi pada perikanan lunak seperti teripang dan lola yang terancam populasinya.

Saat ini PP Ukurlaran masih menggunakan fasilitas lama antara lain : Dermaga kapal, kantor pelayanan pelabuhan perikanan, TPI, Jalan kompleks dan mess pegawai. PP Ukurlaran telah dihibahkan dari Pemerintah daerah ke Ditjen Perikanan Tangkap, KKP.



Gambar 22. Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Saumlaki tahun 2018-2020

Dari kinerja operasional, volume produksi tahun 2018 tercatat 241,78 Ton dengan nilai produksi Rp. 7,25 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 produksi mencapai 378,75 ton dengan nilai produksi Rp. 11,36 Milyar. Periode Januari - Desember tahun 2020 produksi PP Ukurlaran mencapai 166 ton dengan nilai produksi Rp. 10,72 Milyar. Jenis komoditi yang didaratkan di PP Ukurlaran dominan antara lain ikan-ikan karang, ikan hiu dan telur ikan terbang. Secara volume telur ikan terbang sedikit namun nilai ekonominya cukup tinggi.



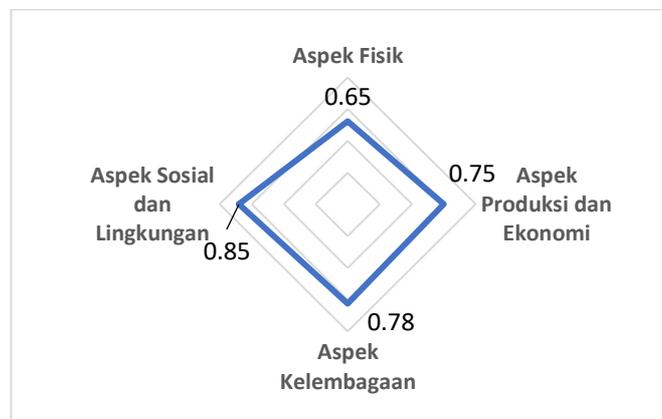
Gambar 23. Grafik Kunjungan kapal di SKPT Saumlaki tahun 2018-2020

Kunjungan kapal 2018 tercatat 260 kali, 2019 tercatat 515 kali dan 2020 tercatat 237 kali. Adanya penurunan disebabkan salahsatunya akibat dampak pandemi sehingga nelayan banyak tinggal dirumah selain akses pasar yang sedang lesu.

Dampak Pembangunan SKPT Saumlaki berupa: (1) Meningkatnya minat investasi bidang perikanan (2). Bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan kepada nelayan telah memberikan kemandirian nelayan dalam penyediaan ketersediaan ikan di Kep. Tanimbar (3). Berjalannya Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdapat beberapa kendala : Fasilitas PPI ukurlaran yang belum memadai, SDM yang terbatas, Maspakai penerbangan tidak membolehkan komoditas perikanan keluar sehingga mempengaruhi volume permintaan ikan di luar kepulauan tanimbar, tidak semua kapal yang meminta SPB mendaratkan ikan di PP Ukurlaran namun sebagian mendaratkan di pasar omele.

Untuk meningkatkan fasilitas, PPI Ukurlaran mendapat hibah JICA untuk pembangunan fasilitas dermaga bongkar, cold storage, pabrik es, mess pegawai, perkantoran dan fasilitas fungsional lainnya. Kegiatan pembangunan dimulai 2020 -2023. Pada tahun ini ditargetkan untuk pekerjaan perencanaan dan DED pembangunan PPI Ukurlaran oleh pihak kegiatan.



Gambar 24. Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki Tahun 2020

Lebih lanjut, SKPT Saumlaki pada tahun 2020 juga menargetkan pada tingkat kemandirian Pra mandiri tingkat 4. Berdasarkan gambar diatas hasil survei kemandirian SKPT pada aspek fisik pada tahun mencapai 0,65. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sarana fisik yang telah direhabilitasi belum mendapat kegiatan pembangunan dari hibah JICA namunsudah terdapat hasil dokumen perencanaan. Untuk aspek produksi dan ekonomi mencapai 0,75 yang didukung dengan efektifnya penggunaan sarana dermaga. Pada aspek kelembagaan mencapai 0,78 yang didukung oleh telah disusun naskah akademik pengusulan PP Ukurlaran sebagai UPT Pusat ke MenPAN. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai 0,85. Pelabuhan Perikanan Ukurlaran saat ini telah memberikan dampak dimana saat ini masyarakat Saumlaki telah berkontribusi dalam penggunaan fasilitas pelabuhan perikanan. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 (≥ 0.75 dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

4. SKPT Merauke, Papua

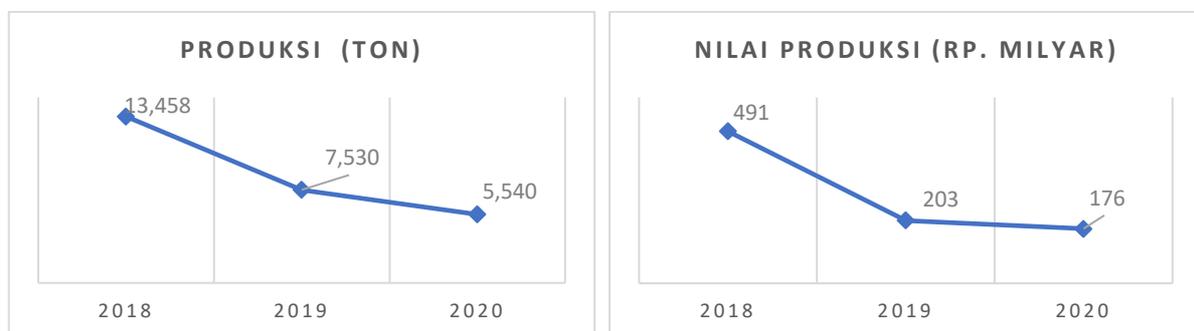
Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah yang berhadapan langsung dengan WPP 718 Laut Arafura. Pembangunan SKPT Merauke lebih ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya perairan di WPP 718 agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan Indonesia Timur khususnya kabupaten merauke yang berada pada wilayah perbatasan dengan negara Papua New Guenia dan Perairan Australia. Potensi Perairan 718 diperkirakan dengan dominasi sumberdaya ikan yang paling tinggi diantara WPP NRI lainnya. Perairan di WPP 718 merupakan salahsatu perairan yang

produktif di Indonesia topografi dominan berlumpur dan kaya akan ikan ikan demersal seperti udang, kerapu, kakap merah dan ikan pelagis besar seperti tongkol dan tengiri.

Sebelum pemberlakuan moratorium kapal eks asing termasuk kapal dengan alat penangkapan ikan trawl, Kabupaten Merauke menjadi pelabuhan pangkalan kapal-kapal eks asing ijin pusat yang berpangkalan di Merauke. Lebih lanjut, kondisi merauke sejak dilakukan moratorium kapal ex asing tidak ada aktivitas industri perikanan dan kegiatan bongkar muat hanya kapal skala kecil 1-2 GT milik masyarakat setempat. Pada tahun 2015 KKP menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lokasi SKPT yang dikoordinatori Ditjen PDSPKP, kemudian sejak pada tahun 2016 dilimpahkan pada Ditjen Perikanan tangkap. Pembangunan SKPT lebih berbasis perikanan tangkap pada pelabuhan perikanan merauke dan aktif dioperasikan pada tahun 2017. Pelabuhan Perikanan Merauke memiliki area 74 Ha, termasuk didalamnya lahan 20 Ha untuk kawasan industri perikanan terpadu yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Lokasi PP Merauke sangat strategis disamping dekat dengan fishing ground juga juga berlokasi di badan sungai besar dengan kedalaman yang dapat menampung kapal berukuran 200 GT sekalipun namun seiring dengan banyaknya kapal yang berpangkalan membutuhkan dermaga bongkar muat yang panjang dari yang dibangun saat ini.

Adapun fasilitas Pelabuhan Perikanan Merauke yang saat ini tersedia antara lain : Dermaga sepanjang 100 m (< 30 GT), Tempat Perbaikan Jaring, Revetment Bronjong, Menara Pengawas, Docking Kapal, Pagar Kawasan, Kantor Keamanan Bersama, Barak Nelayan, SPBN, Es Balok, Cold Storage dan IPAL Kawasan. Sarana Pelabuhan lainnya yaitu : Truck Crane, Truck Box Berinsulasi ,Truck Tangki Air, Truck Pemadam Kebakaran dan Forklift. Sejak dioperasikan, pelaku usaha memberikan respon positif untuk melakukan kegiatan pembongkaran ikan. Pada umumnya ikan-ikan tersebut tertangkap oleh alat penangkapan ikan berjenis gillnet oceanic dan alat penangkap ikan ramah lingkungan lainnya.

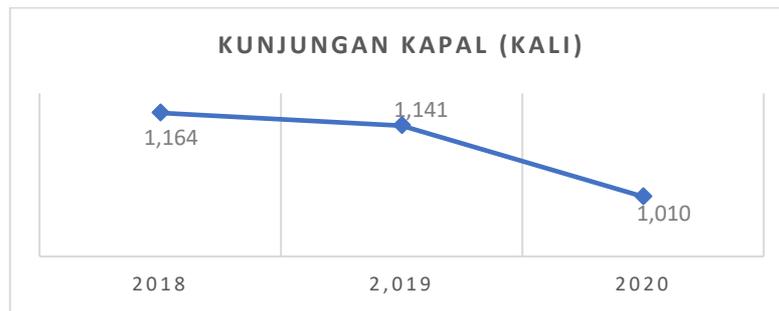
Dari sisi operasional, capaian volume produksi pada tahun 2018 jumlah ikan yang didaratkan mencapai 13.458 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 490,6 miliar. Pada tahun 2019 produksi mencapai 7.529,7 Ton nilai produksi Rp 203,3 miliar. Penurunan ini juga terjadi jika dibandingkan produksi 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pengalihanmuatan ikan antar kapal sehingga kapal yang berangkat dari merauke tidak membawa seluruh hasil tangkapan saat kembali melakukan bongkar muat. Selain itu adanya kebijakan diperbolehkannya SIPI kapal dari 1 pelabuhan pangkalan menjadi 2 lokasi pelabuhan pangkalan.



Gambar 25. Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Merauke tahun 2018-2020

Lebih lanjut, sampai pada tahun 2020 kinerja produksi mencapai 5.540 ton dengan nilai produksi Rp. 176 Milyar. Produksi 2020 ini lebih rendah dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 7.530 Ton. Tren penurunan 2018-2020 disebabkan adanya kebijakan pelabuhan pangkalan boleh 3 lokasi

dan dibolehkannya transshipment ikan hasil tangkapan diatas laut menuju pulau jawa sehingga ikan tidak lagi dibongkar seluruhnya di PP Merauke.



Gambar 26. Grafik kunjungan kapal di SKPT Merauke tahun 2018-2020

Pada kegiatan Kunjungan kapal, pada tahun 2018 tercatat 1.164 kunjungan kapal di PP Merauke kemudian menurun pada tahun 2019 mencapai 1.141 kunjungan kapal. Turun kembali di tahun 2020 tercatat 1.110 kunjungan kapal. Penurunan jumlah kapal dari tahun 2018-2020 mempengaruhi jumlah produksi.

Dampak positif dari Pembangunan SKPT Merauke antara lain : (1) meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, (2) tumbuhnya kegiatan perikanan tangkap dan multiplier effect kegiatan bisnis lainnya, (3) meningkatnya perekonomian masyarakat merauke, (4) pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP 718 yang optimal, (5) ketersediaan suplai bahan baku industri, (7) meningkatnya investasi perikanan di kabupaten merauke, (8) Penyerapan Tenaga Kerja 10.596 nelayan, 50 orang non nelayan (9) meningkatnya kebutuhan logistik perbekalan melaut, meningkatnya permintaan BBM Solar dan (10) meningkatnya pengiriman ikan kontainer berpendingin.

Sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia timur, PP Merauke juga mempunyai beberapa kendala antara lain :

- Jumlah kontainer berpendingin yang tersedia di Merauke tidak sebanding dengan jumlah muatan ikan beku yang akan didaratkan sehingga kapal menunggu bongkar sampai kontainer datang.
- Jumlah dermaga kapal kecil belum memadai dan pernah terjadi kapal karam karena terjepit diantara kapal besar.
- Jumlah SDM ASN dan Kontrak sangat minim dibanding dengan jumlah layanan dan beban yang dipikul oleh PP Merauke.
- Tidak ada pembongkaran malam karena SDM pegawai PP Merauke terbatas.
- Belum adanya perbankan di area pelabuhan perikanan.
- Penerbangan dari dan merauke masih buka tutup sehingga kegiatan investasi, ikan keluar dan pelelangan ikan di TPI tidak optimal
- Pelabuhan Perikanan Merauke belum menjadi Satker UPT yang mandiri dibawah Ditjen Perikanan Tangkap.

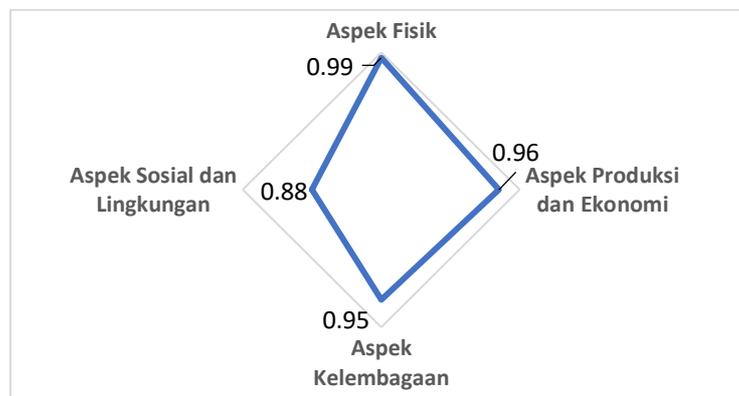
Untuk memberikan kenyamanan terhadap pelaku usaha, rencana pembangunan kedepan yang akan dilaksanakan antara lain :

- Bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun area peti kemas kontainer yang menampung ikan beku untuk selanjutnya dibawa ke Jawa dan sulawesi.
- Menambah kapasitas *Cold Storage* untu menampung ikan hasil tangkapan tanpa harus menunggu kontainer berpendingin.

- Bekerjasama dengan Industri perikanan agar membuka unit plant di merauke yang sudah disediakan lahannya.

Lebih lanjut, terkait capaian tingkat kemandirian SKPT 2020, data hasil kuesioner akan didapatkan pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2020 Ditjen perikanan tangkap menargetkan nilai kemandirian SKPT Merauke pada level Pra Mandiri tingkat 4 (tetap).

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan FGD. Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrument dan penilaian status SKPT yang mandiri berdasarkan aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek Kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan. Tingkat kemandirian SKPT Merauke tahun 2020 pada level Pra Mandiri tingkat 4 dengan grafik poligon sebagai berikut :



Gambar 27. Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Merauke

Berdasarkan gambar diatas hasil survei kemandirian SKPT tahun 2020 pada aspek fisik mencapai 0,99. Hal ini dikarenakan sarana fisik yang telah dibangun telah digunakan dengan baik (terdapat aktivitas penggunaan sarana yang disediakan). Untuk aspek produksi dan ekonomi mencapai 0,96. Hal ini didukung dengan meningkatnya skala penggunaan sarana seperti dermaga, ice flake, TPI, Integrated Cold Storage dan adanya ekspor perdana gelembung renang dari SKPT Merauke. Pada aspek kelembagaan mencapai 0,95 dimana kondisi kelembagaan PP Merauke yang merupakan lokasi SKPT Merauke sudah mendapat DIPA Satker mendapat kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara namun belum menjadi Satker Mandiri yang telah mempunyai kepala pelabuhan perikanan. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai 0,88. Pelabuhan Perikanan Merauke saat ini telah memberikan dampak dimana sebelum operasional kawasan pelabuhan perikanan adalah tempat yang tidak aman dan terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Papua. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 (≥ 0.75 dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik

Sasaran Strategis-6 “Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik”, memiliki 12 (dua belas) IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni (1) Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap; (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap; (3) Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK); (4) Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran

Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019; (5) Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap; (6) Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap; (7) Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik; (8) Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar; (9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap; (11) Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap, dan (12) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap.

Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana yang telah diatur oleh Kemenpan dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP. Komponen penilaian terdiri atas 8 (delapan) area perubahan yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian : Tim RB, Roadmap RB, Pemantauan dan Evaluasi RB, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
2. Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan indikator penilaian :Harmonisasi dan Sistem Pengendalian dalam penyusunan perundang- undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan indikator penilaian :Evaluasi dan Penataan
4. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian :Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
5. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian: Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian :Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
7. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian :Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian :Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi.

Tabel 11. Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-6				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
90,91	81,92	88,11	91,83	30	32,32	107,73	-	30	107,73

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan

Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2020 adalah 30 (kategori A/Memuaskan). Sesuai dengan hasil reuiu terhadap kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap, maka diperoleh kesepakatan nilai PMPRB DJPT sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,71	3,00	1,89
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	2,00	1,55
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25	3,75	3,37
7	Penguatan Pengawasan	2,50	1,99	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2,25	3,75	2,86
Nilai		16,60	13,46	21,70	18,86
Nilai Reform		32,32			

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi lain dalam pencapaian indikator ini berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya seperti pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance. Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme. Selain itu, terdapat permasalahan berupa tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, serta fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpah tindih, berbenturan, terlalu besar.

Oleh karena itu, beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan di DJPT adalah sebagai berikut:

- Komitmen bersama, diawali dengan adanya komitmen Pimpinan beserta seluruh jajaran, baik Pusat maupun UPT.
- Adanya semangat perubahan, terutama menyangkut pola pikir dan budaya kerja.
- Konsistensi, bahwa RB sejatinya adalah perubahan yang terus menerus (continuous improvement) atau dalam operasional dikenal dengan metode Plan, Do, Check, Act (PDCA).
- Ketersediaan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Adanya kerja sama di semua lini organisasi, sehingga ada rasa memiliki RB pada unit kerja kita.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT

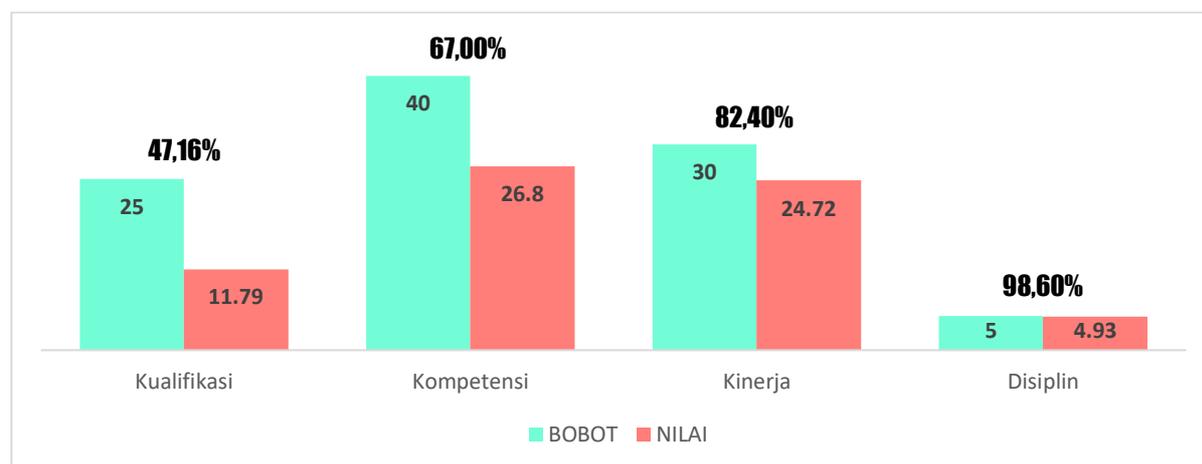
Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPT. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tabel 13. Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-7				Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	74,18	72	68,25	94,79	-7,99	72	94,79



Gambar 28. Hasil Pengukuran IP ASN per Komponen Tahun 2020

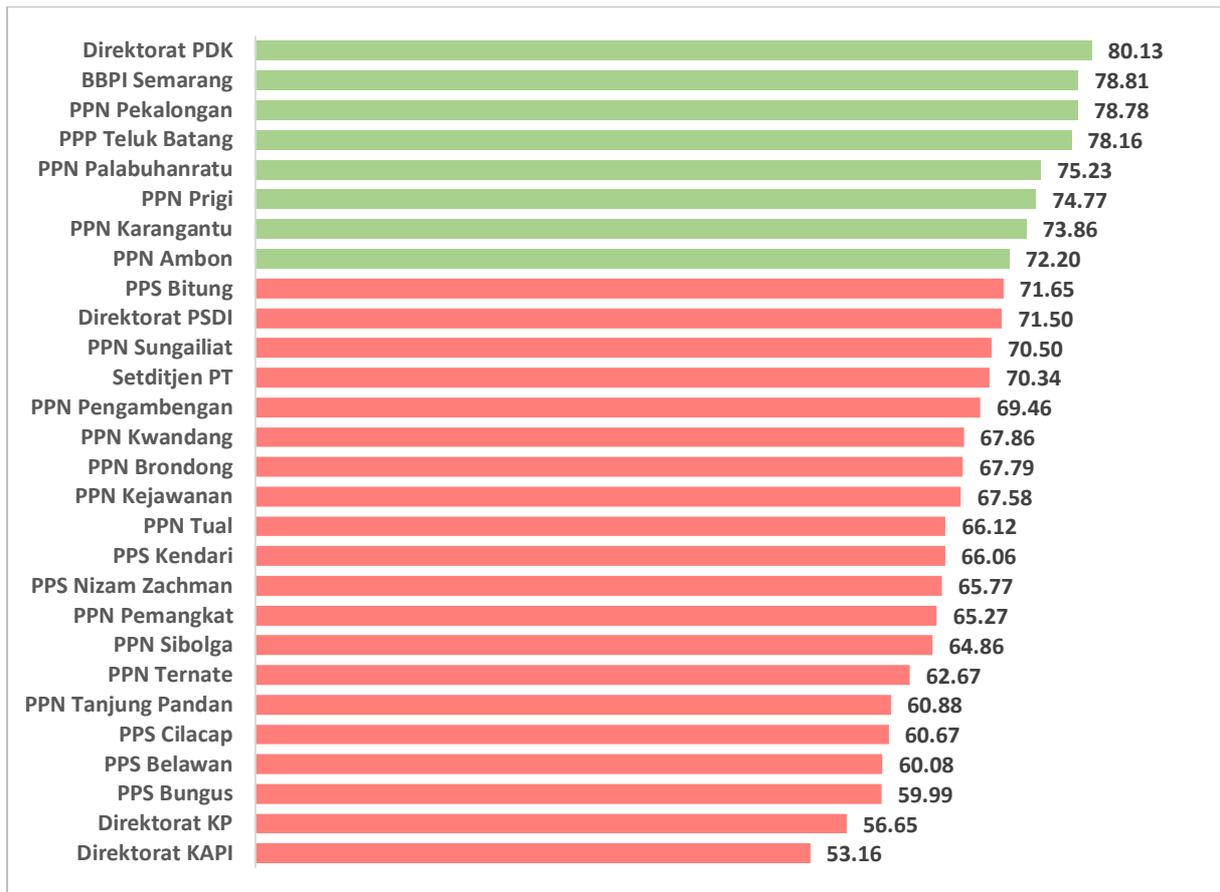
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT tahun 2020 adalah sebesar 68,25 dengan capaian nilai per dimensi yaitu dimensi disiplin (bobot 5) sebesar 4,93, dimensi kinerja (bobot 30) sebesar 24,72, dimensi kompetensi (bobot 40) sebesar 26,80 dan dimensi kualifikasi (bobot 25) sebesar 11,79. Capaian tahun 2020 masih dibawah target, yaitu sebesar 72 dan juga capaian ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, terutama dari dimensi kompetensi. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa ASN yang belum mengumpulkan data dukung dimensi kompetensi walau sebenarnya telah mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi dan

memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas jabatan , mulai dari diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/kursus.

Penyumbang nilai terbesar dalam pencapaian nilai IP ASN lingkup DJPT yaitu dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi diukur dengan menggunakan riwayat pengembangan kompetensi. Untuk Indeks Profesionalitas per Unit Kerja Lingkup DJPT, IP ASN tertinggi dicapai oleh BBPI Semarang dengan nilai sebesar 81,74 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 12,94, dimensi kompetensi sebesar 39,27, dimensi kinerja sebesar 25,00 dan dimensi disiplin sebesar 4,53.

Tabel 14. Capaian Komponen Pembentuk Indeks Profesionalitas per Unit Kerja di DJPT Tahun 2020

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Komponen IP ASN				TOTAL
		Kualifikasi (bobot 25)	Kompetensi (bobot 40)	Kinerja (bobot 30)	Disiplin (bobot 5)	
Setditjen PT	95	13,94	26,55	24,89	4,96	70,34
Direktorat PSDI	54	15,02	26,39	25,09	5,00	71,50
Direktorat KAPI	66	14,88	8,37	25,00	4,91	53,16
Direktorat KP	53	1,15	11,65	25,00	4,85	42,65
Direktorat PDK	74	14,53	35,64	25,00	4,96	80,13
BBPI Semarang	84	13,70	35,18	25,00	4,93	78,81
PPS Nizam Zachman	52	12,33	25,29	23,27	4,88	65,77
PPS Kendari	62	12,82	24,40	23,84	5,00	66,06
PPS Cilacap	58	9,05	21,72	25,00	4,90	60,67
PPS Bungus	47	10,98	18,99	25,11	4,91	59,99
PPS Belawan	55	11,31	19,18	24,64	4,95	60,08
PPS Bitung	31	13,26	28,39	25,00	5,00	71,65
PPN Ambon	42	10,12	32,08	25,00	5,00	72,20
PPN Palabuhanratu	54	12,19	33,75	24,44	4,85	75,23
PPN Ternate	32	11,72	23,20	22,75	5,00	62,67
PPN Prigi	60	11,02	33,75	25,00	5,00	74,77
PPN Pemangkat	28	8,39	26,70	25,18	5,00	65,27
PPN Sibolga	42	10,83	24,17	25,00	4,86	64,86
PPN Tual	20	9,00	27,62	25,00	4,50	66,12
PPN Kejawanan	46	10,13	27,45	25,00	5,00	67,58
PPN Pekalongan	42	10,36	39,23	24,43	4,76	78,78
PPN Brondong	51	11,47	26,32	25,00	5,00	67,79
PPN Tanjung Pandan	22	9,18	22,61	24,09	5,00	60,88
PPN Sungailiat	22	10,50	30,45	24,55	5,00	70,50
PPN Pengambang	30	13,17	26,42	25,00	4,87	69,46
PPN Karangantu	22	13,18	30,68	25,00	5,00	73,86
PPN Kwandang	14	12,86	25,00	25,00	5,00	67,86
PPP Teluk Batang	19	8,95	39,21	25,00	5,00	78,16



Gambar 29. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2020

Selama tahun 2020 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian.
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan.
4. Monitoring dan evaluasi presensi.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

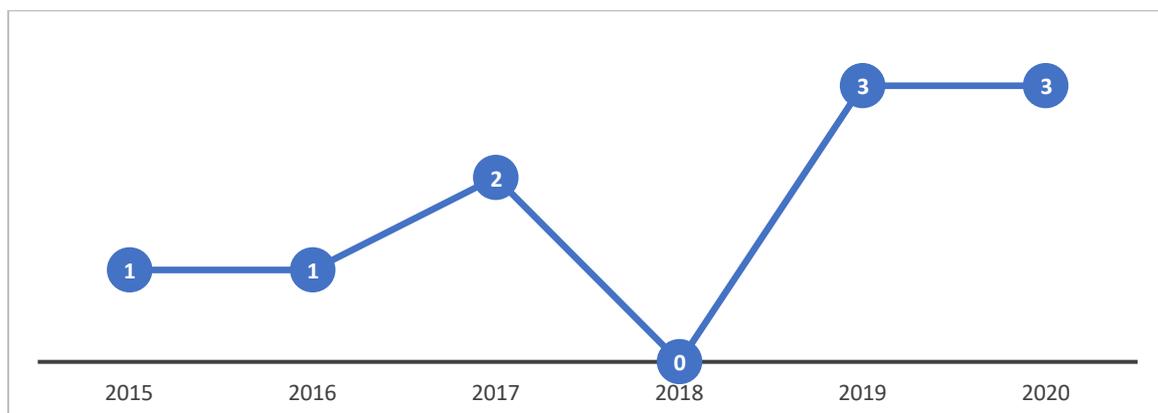
Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .
- Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Tabel 15. Capaian IKU “Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-8				Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	7	8	10	125,00	66,67	8	125,00

Berdasarkan ketentuan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap menetapkan target 3 (tiga) Satker sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK, yaitu: PPS Bitung dengan nilai sebesar 81,89, PPN Kejawanan dengan nilai sebesar 81,34 dan PPN Pekalongan dengan nilai sebesar 79,75. Hal tersebut dituangkan dalam IKU Level I Ditjen Perikanan Tangkap. Dalam perjalanannya, dilakukan beberapa kali pendampingan selama Tahun 2020 yang melibatkan Tim Ditjen Perikanan Tangkap (Pusat), yang terdiri dari Sekretariat dan Direktorat Pelabuhan Perikanan. Di samping itu, Inspektorat II sebagai mitra Ditjen Perikanan Tangkap juga beberapa kali turun ke unit kerja tersebut melakukan pendampingan sekaligus memonitor capaian progres atas pembangunan ZI Menuju WBK.



Gambar 30. Perkembangan Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2015-2020

Hampir setiap tahun unit kerja di DJPT mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun hanya tahun 2018 tidak mendapatkan predikat WBK. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut

ditunjang oleh adanya Tim Pendamping Pembangunan ZI Menuju WBK lingkup Pusat yang secara berkala melakukan pendampingan serta monev capaian pada unit kerja yang sedang dibangun. Di samping itu, terjadi peningkatan pola koordinasi antar-unit kerja yang sedang dibangun, terutama dalam hal pemenuhan dokumen bukti. Program dan kegiatan yang juga menunjang pencapaian IKU tersebut adalah pembentukan Satgas SPIP di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pembentukan Satgas SPIP yang beranggotakan masing-masing unit kerja ikut mengakselerasi pembangunan ZI Menuju WBK, khususnya pada area penguatan pengawasan.

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audit) tidak melebihi 1%. Indikator ini bersifat tahunan, pada tahun 2020 capaian IKU ini adalah 0,02% atau melebihi target sebesar 119,56%.

Tabel 16. Capaian IKU “Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-9				Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	3,25	0,02	1	0,13	187,00	-5,5	1	187,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPT” sebesar 0,13%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar $\leq 1\%$. Adapun nilai temuan DJPT adalah sebesar Rp. 712.021.137,00 dan realisasi anggaran tahun 2019 DJPT adalah sebesar Rp. 563.016.153.029,00.

Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-

usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 17. Capaian IKU “Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-10				Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
89,03	83,20	84,18	85,10	85	85,21	100,25	0,13	85	100,25

Target indikator nilai AKIP DJPT pada 2020 adalah 85 (kategori A/ Memuaskan). Penilaian terhadap implementasi SAKIP oleh Inspektorat II diperoleh nilai 85,21 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Komponen PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,74
2	Pengukuran Kinerja	25	21,07
3	Pelaporan Kinerja	15	13,27
4	Evaluasi Internal	10	7,88
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	17,26
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,21
Predikat Penilaian		A	

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Kinerja**
DJPT telah menyusun Rancangan Teknokratik maupun draft Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi. Hasil evaluasi lebih lanjut, target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan dan untuk penyusunan kinerja kepada tingkat dibawahnya (level II, III, IV dan Dekonsentrasi). Selain itu, Rencana Aksi belum sepenuhnya dimonitor capaiannya secara berkala dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- **Pengukuran Kinerja**

DJPT telah memiliki IKU sebagai ukuran kerja secara formal dan pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi. Hasil evaluasi lebih lanjut, target kinerja level III dan IV belum sepenuhnya dimonitor capaiannya dan hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Selain itu, hasil pengukuran Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- **Pelaporan Kinerja**
DJPT telah menyusun Laporan Kinerja dan telah disampaikan serta dipublikasikan, namun informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.
- **Evaluasi Internal**
DJPT melakukan evaluasi internal berupa pemantauan kemajuan capaian kinerja, evaluasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi. Namun, hasil evaluasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang dan dalam bentuk langkah nyata.
- **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**
Capaian kinerja DJPT sebesar 17,16 dari bobot 20. Hal ini menunjukkan kinerja DJPT masih belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pencapaian output dan outcome serta kinerja berdasarkan penilaian stakeholder (inisiatif dalam pemberantasan korupsi dan inovasi dalam manajemen kinerja).

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan capaian Rencana Aksi dan kinerja level III dan IV secara berkala.
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan dan Rencana Aksi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang dan dalam bentuk langkah nyata.
- c. Memanfaatkan target kinerja untuk mengukur keberhasilan dan untuk penyusunan kinerja tingkat dibawahnya.
- d. Pemberian *reward and punishment*, pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, dan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan Rencana Aksi.
- e. Meningkatkan capaian kinerja output, outcome dan kinerja berdasarkan penilaian stakeholder.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini antara lain, penyusunan rencana kinerja yang memenuhi unsur SMART, pengukuran kinerja berbasis IT, pemantauan dan pelaporan kinerja baik secara triwulanan maupun tahunan, penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP), penetapan tim pengelola kinerja, pembahasan dan pengumpulan bukti data dukung kinerja.

Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini

mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor 14.19/ITJ/HP.610/XI/2020 tentang Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 tanggal 19 November 2020, hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 dengan perolehan nilai sebesar 4,410 atau berada pada level 4 (terkelola dan terukur).

Tabel 19. Capaian IKU “Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-11				Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
3	3	3	3	3	4	133,33	33,33	3	133,33

Tabel 20. Hasil Pencapaian Nilai Evaluasi Level Maturitas SPIP DJPT Per Aspek Komponen Tahun 2018-2020

FOKUS PENILAIAN	NILAI IDEAL	2018		2019		2020	
		SKOR	%	SKOR	%	SKOR	%
Lingkungan Pengendalian	1,5	1,089	72,60	1,126	75,07	1,238	82,50
Penilaian Risiko	1,00	0,800	80,00	0,800	80,00	0,800	80,00
Kegiatan Pengendalian	1,25	0,748	59,84	0,748	59,84	0,977	78,18
Informasi dan Komunikasi	0,50	0,300	60,00	0,300	60,00	0,450	90,00
Pemantauan	0,75	0,525	70,00	0,525	70,00	0,675	90,00
JUMLAH SKOR	5,00	3,46	69,24	3,50	69,98	4,14	82,80
TINGKAT MATURITAS		3 (Terdefinisi)		3 (Terdefinisi)		4 (Terkelola & Terukur)	

Pada tahun 2020, pencapaian nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan yaitu 3,499 (level 3/terdefinisi) di tahun 2019 menjadi 4,410 (level 4/ terkelola dan terukur) di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa DJPT telah melakukan perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta hal tersebut menunjukkan bahwa:

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian.
- Evaluasi formal dan terdokumentasi, namun sebagian besar evaluasi dilakukan secara manual dan belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu:

- Memberikan perbaikan pelayanan publik.
- Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model)
- Berkelanjutan.
- Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun 2020 adalah 1 (satu) inovasi dan diukur pada akhir tahun. Target indikator Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 adalah 1 (satu) inovasi dan pada tahun 2020 telah tercapai 1 inovasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21. Capaian IKU “Unit Kerja DJPT Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-12				Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	1	1	1	1	1	100,00	0	1	100,00

Pada tahun 2018 capaian indikator ini diperoleh dari Laser Ikan Pari (Layanan E-Services Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Profesional dan Mandiri) atau lebih dikenal dengan e-services merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dalam mengatasi permasalahan perizinan usaha perikanan tangkap. Tahun 2019, didapatkan dengan inovasi terhadap Aplikasi TemanSPB yang merupakan sebuah sistem penerbitan STBLK Kedatangan, STBLK Keberangkatan, SPB dan pembebasan SPB yang dilakukan secara online. Sedangkan untuk tahun 2020 capaian indikator ini diperoleh dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melalui inovasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

Sebelum tahun 2000, proses penerbitan perizinan usaha perikanan masih dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik. Kemudian sejak tahun 2000 mulai dikembangkan Sistem Informasi untuk Perizinan Penangkapan Ikan namun masih bersifat offline. Saat ini telah dikembangkan suatu sistem perizinan yang bersifat online “Sistem Perizinan Layanan Cepat” atau disingkat SILAT yang dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan tangkap dimana pun dan kapan pun. Persyaratan yang diperlukan hanya diupload, pembayaran dan penyerahan bukti bayar pungutan perikanan pun sudah terintegrasi dengan sistem informasi PNPB Kementerian Keuangan dan pelaku usaha dapat langsung mencetak secara mandiri SIUP, SIPI dan SIKPI. Pada tanggal 30 Desember 2019 diselenggarakan peluncuran Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap 1 Jam Secara Online (SILAT) sebagai salah satu sarana komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem informasi perizinan usaha perikanan tangkap sekaligus ujicoba penerbitan izin melalui SILAT.

Perizinan usaha perikanan tangkap merupakan upaya untuk mengelola sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh semua pihak dan dapat memberikan kesinambungan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha perikanan tangkap. Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perizinan usaha perikanan tangkap bertujuan diantaranya untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan SILAT telah terintegrasi dengan system pada unit kerja lain baik di lingkungan KKP diantaranya SIPALKAH (Dit. KAPI), VMS/SKAT (Ditjen. PSDKP), DSS (DJPT) maupun antar kementerian terkait diantaranya OSS (BKPM), HUBLA (Kementerian Perhubungan), SIMPONI - NPWP (Kementerian Keuangan) pada Kementerian Keuangan namun perlu lebih dikembangkan untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemanfaatan SILAT akan mempercepat proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan investasi.

Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

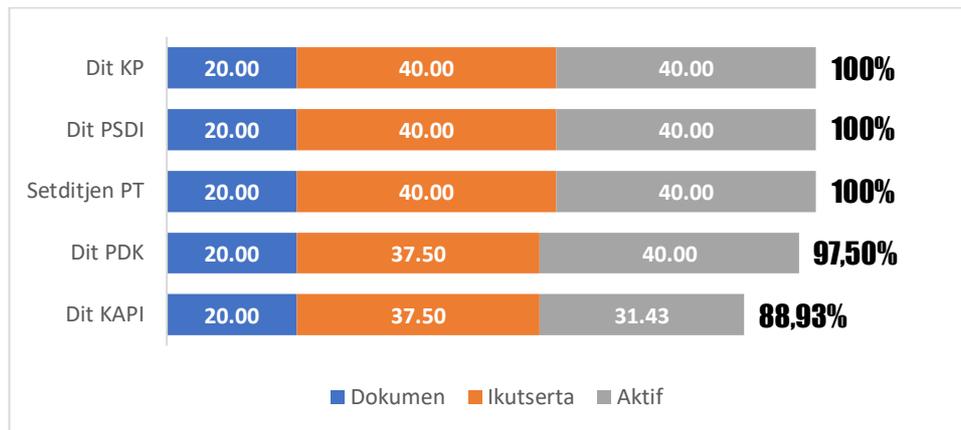
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 22. Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-13				Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
20,63	20,26	73,21	81,02	82	96,19	117,30	18,72	82	117,30

Pada tabel terlihat bahwa realisasi Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup DJPT tahun 2020 sebesar 117,30%%, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 18,72% yang disebabkan karena sebagian besar pejabat di level 3 dan 4 serta staf

telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam sharing informasi. Adapun nilai dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon II lingkup DJPT seperti gambar berikut.



Gambar 31. Capaian Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup DJPT es II per komponen Tahun 2020

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh dokumen pendukung Manajemen Pengetahuan telah seluruhnya terpenuhi. Nilai Manajemen Pengetahuan tertinggi pada Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap senilai 100%, dengan nilai keikutsertaan 100% dan keaktifan 100%. Sedangkan nilai Manajemen Pengetahuan yang masih rendah yaitu pada Direktorat Perizinan dan Kenelayan dengan nilai 97,50% dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai 88,93%, hal ini disebabkan karena pelaksana lingkup Direktorat PDK dan KAPI belum tergabung dalam aplikasi Bitrix serta tingkat keaktifannya pada Direktorat KAPI hanya 31,43%. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) merekomendasikan untuk memberikan teguran tertulis bagi level di unit kerja yang tingkat keaktifannya.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikan Tangkap adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Tabel 23. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-14				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	72,08	60	79,06	131,77	9,68	60	131,77

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 ini mencapai 79,06 atau 131,77% dari target 60. Angka ini didapat dari perhitungan total temuan awal sebanyak 191 rekomendasi dan telah dilakukan tindak lanjut (tuntas) 151 rekomendasi sehingga sisa rekomendasi adalah sebesar 40 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dalam melakukan tindak lanjut (tuntas) rekomendasi, DJPT telah mengalami peningkatan sebesar 9,68%. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden;
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Tabel 24. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-15				Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	90,94	91,16	94,68	70	92,55	132,21	-	70	132,21

Secara umum Bantuan Pemerintah Tahun 2019 telah dimanfaatkan oleh penerima bantuan sesuai dengan tujuan penyalurannya. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini memiliki tujuan untuk menilai pemanfaatan kegiatan prioritas dan mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup DJPT TA 2019 rata-rata senilai 92,55, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 74 unit dan dilakukan evaluasi terhadap 35 unit dengan hasil penilaian sebesar 90,29. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 32 dari 35 unit kapal (91,43%) telah dioperasikan untuk kegiatan penangkapan ikan serta selanjutnya sebanyak 24 dari 35 penerima kapal (68,57%), mampu menambah pendapatan. Kapal telah beroperasi dan telah menambah pendapatan bagi nelayan serta telah membuat laporan/pencacatan hasil tangkapan.

Hambatan dalam efektivitas bantuan Kapal Penangkap Ikan diuraikan sebagai berikut:

- Biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan.
- Alat penangkapan ikan belum dapat digunakan secara maksimal (tali pancing mudah putus) dan biaya operasional lebih mahal dari pendapatan.
- Pelaporan/pencacatan hasil produksi tidak pernah dilaporkan.

2. Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Jumlah bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 292 paket dan dilakukan evaluasi terhadap 109 paket dengan hasil penilaian sebesar 90,83. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 97 dari 109 paket API (88,99%) telah dioperasikan untuk kegiatan penangkapan ikan, serta sebanyak 80 dari 109 penerima API (73,39%) mampu menambah pendapatan.

Hambatan dalam efektivitas bantuan Alat Penangkapan Ikan diuraikan sebagai berikut:

- Tidak memanfaatkan API yang diterima yang disebabkan bantuan API yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Pelaporan/pencacatan hasil produksi tidak pernah dilaporkan.

3. Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada lokasi pemeriksaan fisik dan uji substansi sebanyak 21.346 penerima dan dilakukan evaluasi terhadap 705 penerima dengan hasil penilaian sebesar 92,93. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 235 dari 705 penerima BPAN (33,33%) yang dilakukan uji petik telah melanjutkan premi asuransi secara mandiri pada periode berikutnya.

Hambatan dalam efektivitas Bantuan Premi Asuransi Nelayan diuraikan sebagai berikut:

- Penerima BPAN tidak menerima kartu asuransi nelayan.
- Kesadaran terhadap pentingnya asuransi penerima BPAN belum tumbuh.
- Penerima BPAN tidak memahami tata cara klaim asuransi.
- Sebagian besar penerima BPAN tidak melanjutkan premi asuransi secara mandiri.

Secara umum, untuk kedepannya direkomendasikan agar mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan yang dihadapi oleh penerima bantuan TA 2019 dan meningkatkan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui monitoring dan evaluasi, khususnya mengenai keberlanjutan usaha dan kemandirian penerima bantuan serta kepatuhan penerima bantuan dalam melaksanakan pelaporan secara berjenjang. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran Bantuan Pemerintah pada masa mendatang agar melakukan reuiu petunjuk teknis yang akan disusun untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah khususnya berkaitan dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan usaha atau kegiatan penerima Bantuan Pemerintah di lingkup DJPT.

Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Tabel 25. Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-16				Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	84,49	93,14	87	93,16	105,86	0,02	87	105,86

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 93,16. Oleh sebab itu evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu dilakukan peningkatan sepanjang tahun periode anggaran berjalan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana

anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen, (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Tabel 26. Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

Sasaran Strategis-6				Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap Yang Baik					
IKU-17				Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kenaikan 2019-2020	Renstra DJPT 2020-2024	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	-	-	85	92,02	108,26	-	85	108,26

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Realisasi nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 adalah sebesar 92,02% dengan kategori baik dari target 85,00 yang ditetapkan atau diatas target sebesar 108,26%.

Beberapa kendala dalam pengisian aplikasi SMART, yaitu:

- Operator belum memahami cara pengisian sesuai Juknis pengisian aplikasi smart;
- Operator tidak mendapatkan data dalam pengisian capaian Realisasi Volume Keluaran;
- Terdapat pengisian berulang sehingga terjadi akumulasi capaian;
- Realisasi Indikator eluaran Kegiatan belum diinput hal ini mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Satker dan DJPT;
- Setiap tahun selalu ada pergantian operator yang tidak dilatih oleh operator sebelumnya; dan
- Belum seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga minim capaian output.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.400.303.000,- atau turun sebesar Rp. 48.898.419.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2019 (-7,83%). Pagu alokasi anggaran tahun 2020 tersebut 20% digunakan untuk belanja aparatur dan 80% untuk belanja program prioritas. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 ini terealisasi sebesar Rp. 492.002.352.961,- atau mencapai 85,51%.

Tabel 27. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	72.119.897.000	27.180.429.264	37,69
2	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	69.327.272.000	61.267.264.763	88,37
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	52.717.092.000	47.801.226.061	90,68
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12.953.694.000	12.527.407.392	96,71
5	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	368.282.348.000	343.226.025.481	93,20
TOTAL		575.400.303.000	492.002.352.961	85,51

Realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan lebih rendah dibandingkan kegiatan lainnya, hal ini karena pelaksanaan kegiatan bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan yang tidak terealisasi 100% akibat waktu pelaksanaan yang terbatas dan kemampuan penyedia sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan. Selain itu juga tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan diantaranya pengadaan Alat Bantu Usaha Perikanan dan Perlindungan Nelayan (VMA), dan aktivasi SPDN, sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 secara keseluruhan.

Tabel 28. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	178.657.884.000	160.771.268.101	89,99
2	Belanja Barang	362.351.771.000	297.465.145.055	82,09
3	Belanja Modal	34.390.648.000	33.765.939.805	98,18
TOTAL		575.400.303.000	492.002.352.961	85,51

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja tahun 2020 hampir sama dengan tahun 2019 yakni belanja barang lebih besar dibandingkan belanja pegawai maupun modal.

Tabel 29. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	280.100.744.000	220.911.595.245	78,87
2	UPT	288.991.583.000	265.083.913.362	91,73
3	Dekonsentrasi	6.307.976.000	6.006.844.354	95,23
TOTAL		575.400.303.000	492.002.352.961	85,51

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada tahun 2020 realisasi tertinggi adalah pada Dekonsentrasi, sedangkan yang realisasi terendah adalah kewenangan Pusat. Hal ini disebabkan kegiatan pusat lebih fokus dalam tahap koordinasi sebagai dampak diberlakukannya *Work From Home* (WFH), sehingga beberapa kegiatan dalam pertemuan langsung ditunda atau dibatalkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup DJPT, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan *refocusing*/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. DJPT terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Tabel 30. Efisiensi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan	0	0	99,23	0	99,23
2	Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	8.025.942.000	7.723.053.297	120	96,23	23,77
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab	1.770.526.000	1.709.918.808	100	96,58	3,42
4	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan	176.176.788.000	119.219.174.181	100	67,67	32,33
5	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang Mandiri	8.633.876.000	8.119.735.588	100	94,05	5,95
6	Tata Kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	380.793.171.000	355.431.693.882	112,48	93,34	19,14

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun 2020. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Pada tahun 2020, rata-rata pencapaian sasaran strategis Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 105,29%. Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020, dari total 17 IKU pendukung sasaran strategis, terdapat 15 IKU yang telah mencapai target pada Tahun 2020 (capaian >100%) dan 2 IKU yang belum dapat mencapai target Tahun 2020 (capaian <100%). Terdapat perbedaan target antara target yang tercantum pada Renstra DJPT tahun 2020-2024 dengan PK DJPT Tahun 2020, yaitu pada indikator Produksi Perikanan Tangkap dimana pada renstra ditetapkan 8,02 juta ton sementara di PK ditetapkan 7,70 juta ton. Perbedaan penetapan ini terjadi karena terjadi pengurangan anggaran, besarnya anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam renstra.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal.
2. Untuk Bantuan Pemerintah kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk provinsi yang nilai capaian NTN masih rendah dan kelompok/nelayan yang siap, mampu dan sanggup, sehingga diharapkan di tahun 2021 NTN mengalami peningkatan.
3. Dalam hal kinerja penyerapan anggaran agar setiap unit kerja/satker agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memperhatikan efisiensi setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Memperkuat kerjasama dengan instansi lain, khususnya pada kerjasama pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian IKU Ditjen Perikanan Tangkap.
5. Rapat penataan pelaporan secara rutin.